

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

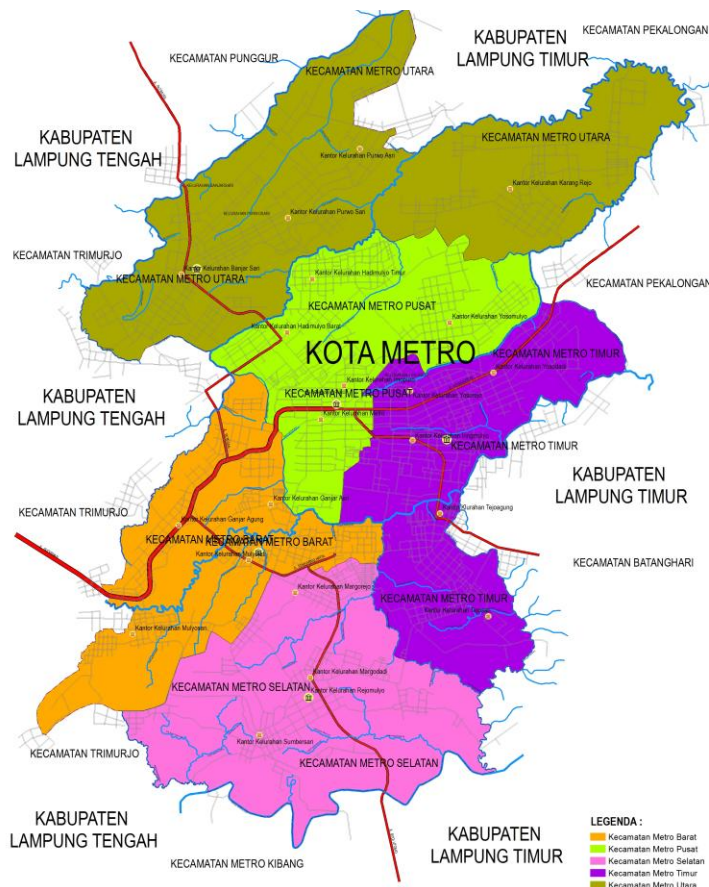
1). Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Metro merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Sebagai daerah otonom dengan status kota yang kedua yang ada di Provinsi Lampung, Metro menjadi salah satu pusat pertumbuhan kota

Luas wilayah administrasi Kota Metro 68,74 km² atau 0,19% dari luas Provinsi Lampung yang besarnya 3.528.835 km². Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1
Peta Batas Wilayah Kota Metro



Sumber : RTRW Kota Metro 2011 – 2031

Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 19,64 km² atau 28,57% dari luas wilayah Kota Metro, sementara yang paling kecil adalah Kecamatan Metro Barat seluas 11,28 km² atau 16,41% terhadap luas wilayah Kota Metro.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kota Metro

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	% terhadap luas total
1.	Metro Pusat	Metro	2,28	3,32
		Imopuro	1,19	1,73
		Hadimulyo Timur	3,37	4,90
		Hadimulyo Barat	1,50	2,18
		Yosomulyo	3,37	4,90
	Sub total		11,71	17,04
2.	Metro Utara	1. Banjarsari	5,75	8,36
		2. Purwosari	2,55	3,71
		3. Purwoasri	3,62	5,27
		4. Karangrejo	7,72	11,23
	Sub total		19,64	28,57
3.	Metro Selatan	1. Rejomulyo	4,75	6,91
		2. Margorejo	2,46	3,58
		3. Margodadi	2,87	4,18
		4. Sumbersari Bantul	4,25	6,18
	Sub total		14,33	20,85
4.	Metro Timur	1. Iring Mulyo	1,89	3,22
		2. Yosodadi	3,36	4,89
		3. Yosorejo	1,22	1,77
		4. Tejosari	3,76	5,47
		5. Tejo Agung	1,55	2,25
	Sub total		11,78	17,14
5.	Metro Barat	1. Mulyojati	2,95	4,29
		2. Mulyosari	3,03	4,41
		3. Ganjar Agung	2,88	4,19
		4. Ganjarsari	2,42	3,52
	Sub total		11,28	16,41
	Luas total wilayah Kota Metro		68,74	100,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro

2). Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Metro terletak pada 5°6" – 5°8" Lintang Selatan dan 105°17" – 105°19" Bujur Timur. Kedudukannya yang berada di tengah Provinsi Lampung, menjadikannya sebagai penghubung dari dan ke berbagai kabupaten di sekitarnya, baik melalui jalur jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Di samping itu, Kota Metro memiliki daya tarik bagi penduduk dari

luar daerah, baik dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, maupun Lampung Selatan untuk melakukan berbagai aktivitas, khususnya untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, serta jasa perkotaan lainnya.

3). Topografi

Topografi Kota Metro berupa daerah dataran alluvial, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan antara 0-5%. Hanya sedikit wilayah yang berombak sampai bergelombang, yaitu di bagian Utara dan Selatan kota dengan kemiringan antara 6-15%.

4). Geologi

Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan alluvium (campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik.

5). Hidrologi

Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran sungai Way Sekampung pada bagian Selatan dan Way Raman di sebelah Utara. Selain itu dalam wilayah Kota Metro mengalir sungai Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim kemarau debit air Way Batanghari mencapai 9-10 m³/detik dan pada musim hujan mencapai 500 m³/detik, sedangkan debit Way Bunut pada musim kemarau mencapai 5-6 m³/detik dan pada musim hujan mencapai 100-200 m³/detik. Wilayah yang dialiri kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah aliran ke arah Timur. Keberadaan sungai di Kota Metro sangat menunjang pengembangan sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan.

6). Klimatologi

Kota Metro beriklim tropis, sebagaimana kondisi iklim wilayah Provinsi Lampung pada umumnya. Secara terperinci kondisi iklim di

Kota Metro terletak di garis khatulistiwa pada posisi 5⁰ Lintang Selatan yang beriklim Humid Tropis, dengan arah angin laut yang bertiup dari Samudra Indonesia dan Laut Jawa. Pada bulan November sampai Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, sedangkan pada bulan Juli sampai Agustus bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam.

Pada ketinggian antara 30-62 meter dari permukaan laut, temperatur udara rata-rata berkisar 26⁰C-28⁰C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28⁰C. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33⁰C dan temperatur minimum 22⁰C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80%-88% dan akan semakin tinggi pada tempat yang lebih tinggi.

Rata-rata curah hujan Kota Metro adalah antara 1.921,07 mm per tahun. Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei dengan curah hujan tertinggi pada Januari sampai Maret, sedangkan bulan kering terjadi pada Juni sampai Agustus.

7). Penggunaan Lahan

Menurut Sensus Pertanian Tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Metro telah mengalami penurunan sebesar 30,03% jika dibandingkan dengan data jumlah rumah tangga pertanian pada sensus tahun 2003. Walaupun demikian sawah masih mendominasi pada pola penggunaan lahan di Kota Metro, hal ini terlihat dari luas sawah pada tahun 2014 sebesar 2.922,20 ha hanya turun sebesar 1,93% jika dibandingkan dengan luas sawah pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.979,56 ha. Persentase terbesar lahan sawah terdapat di Kecamatan Metro Selatan seluas 857,87 hektar (28,94%), sementara paling rendah di Kecamatan Metro Pusat seluas 334 hektar (11,30%).

Rincian luas lahan menurut penggunaan lahan di Kota Metro pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan Kota Metro Tahun 2014

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	2.922,20	43,32
2.	Rumah, bangunan, dan halaman	2.381,10	35,38
3.	Hutan rakyat	138,00	2,01
4.	Rawa	23,00	0,33
5.	Kolam	76,00	1,10
6.	Tegal/kebun	56,90	1,25
7.	Ladang/huma	83,00	1,11
8.	Padang rumput	12,00	0,20
9.	Lainnya	215,25	15,30

Sumber : BPS Kota Metro, Buku Metro Dalam Angka 2014

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu kesatuan dalam pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung – Metro. Dengan fungsi utama sebagai: (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus.

Selain itu, Kota Metro bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu Berbasis Potensi Lokal.

Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.
3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan Kelurahan Banjar Sari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo.

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

- a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibu kota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya.
- b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).

- c. Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayanan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.
- d. Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pada kawasan ini.
- e. Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Sehingga untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar.

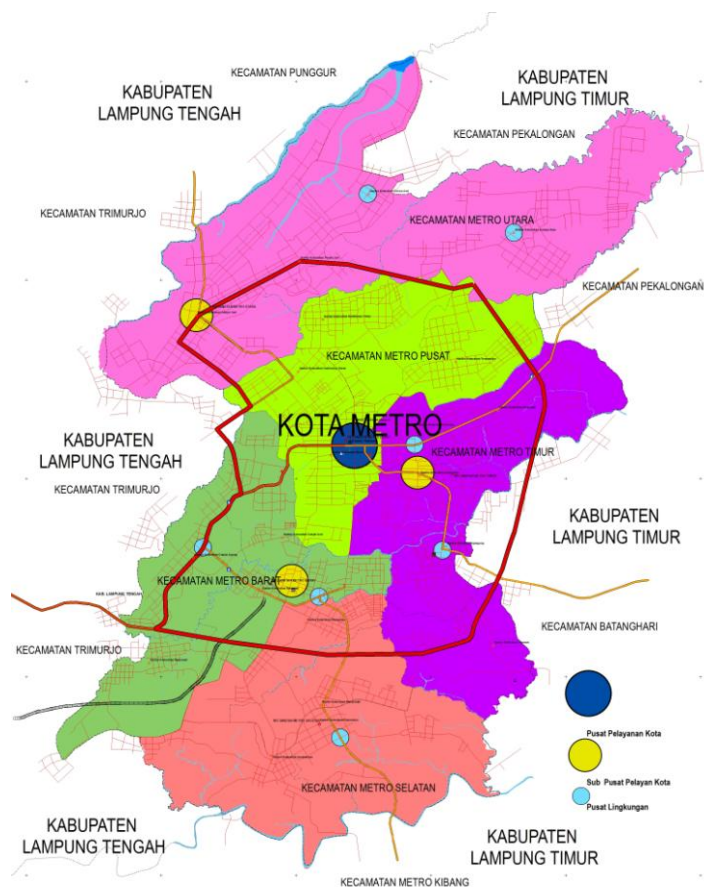
Tabel 2.3
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Metro

NO	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	SKALA PELAYANAN
A	PUSAT PELAYANAN KOTA (PPK)		
1.	KECAMATAN METRO PUSAT	1. Pusat Pemerintahan 2. Perdagangan dan jasa 3. Perkantoran 4. Pendidikan 5. Kesehatan 6. Permukiman	REGIONAL DAN KOTA
B	SUB PUSAT PELAYANAN KOTA (SPPK)		
1.	KECAMATAN METRO TIMUR	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman 3. Pendidikan Tinggi 4. Kesehatan 5. Wisata	KOTA DAN LOKAL
2.	KECAMATAN METRO BARAT	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman 3. Pendidikan Tinggi 4. Kesehatan 5. Wisata	KOTA DAN LOKAL
3.	KECAMATAN METRO UTARA	1. Perdagangan dan Jasa 2. Wisata 3. Pendidikan Tinggi 4. Kesehatan 5. Pertanian 6. Peternakan 7. Permukiman 8. Industri	KOTA DAN LOKAL
C	PUSAT LINGKUNGAN (PL)		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	KELURAHAN PURWOASRI, KELURAHAN KARANGREJO, KELURAHAN GANJARAGUNG, KELURAHAN YOSOREJO, KELURAHAN TEJOAGUNG, KELURAHAN MARGOREJO KELURAHAN REJOMULYO	1. Perdagangan dan Jasa 2. Pertanian 3. Peternakan 4. Perikanan 5. Permukiman 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Wisata	LOKAL

Sumber : RTRW Kota Metro Tahun 2011 - 2031

Gambar berikut menunjukkan rencana struktur ruang Kota Metro, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2011 – 2031. Dalam peta, tergambar potensi pengembangan wilayah Kota Metro.

Gambar 2.2
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Metro



Sumber : RTRW Kota Metro Tahun 2011 - 2031

Potensi pengembangan wilayah di Kota Metro meliputi beberapa kawasan, antara lain :

- 1). Kawasan Permukiman, meliputi : kawasan perumahan kepadatan tinggi yang diarahkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur dan sebagian Kecamatan Metro Barat; kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada

kawasan sebagian Kecamatan Metro Barat, dan sebagian Kecamatan Metro Utara; kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Metro Selatan dan sebagian Kecamatan Metro Utara. Pengembangan di Kecamatan Metro Selatan diarahkan sebagai kawasan permukiman terbatas untuk menjaga keberadaan lahan sawah berkelanjutan.

- 2). Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi : pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan Kota (PPK) diarahkan pada sebagian Jalan Teuku Umar, sebagian Jalan Wijaya Kesuma, sebagian Jalan Ryacudu, dll. Kawasan perdagangan dan jasa di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) pada Kecamatan Metro Timur diarahkan pada sebagian Jalan Ahmad Yani, sebagian Jalan Ki hajar Dewantara, sebagian Jalan AH. Nasution, dll. Kawasan perdagangan dan jasa di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) pada Kecamatan Metro Barat diarahkan pada sebagian Jalan Sudirman, sebagian Jalan Soekarno Hatta, sebagian Jalan Yos Sudarso, dll. Kawasan perdagangan dan jasa di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) pada Kecamatan Metro Utara diarahkan pada sebagian Jalan Kartini – Jalan Pattimura. Kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Lingkungan (PL) pada Jalan Kartini di Kelurahan Purwo Asri, Jalan WR. Supratman di Kelurahan Karang rejo dan Jalan Budi Utomo Kelurahan Margorejo.
- 3). Kawasan perkantoran, meliputi : perkantoran pemerintah di Jalan Sudirman Jalan Ahmad Yani, Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Jalan Nasution; sedangkan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.
- 4). Kawasan Industri, meliputi : Kawasan peruntukan industri menengah diarahkan di Banjarsari Kecamatan Metro Utara

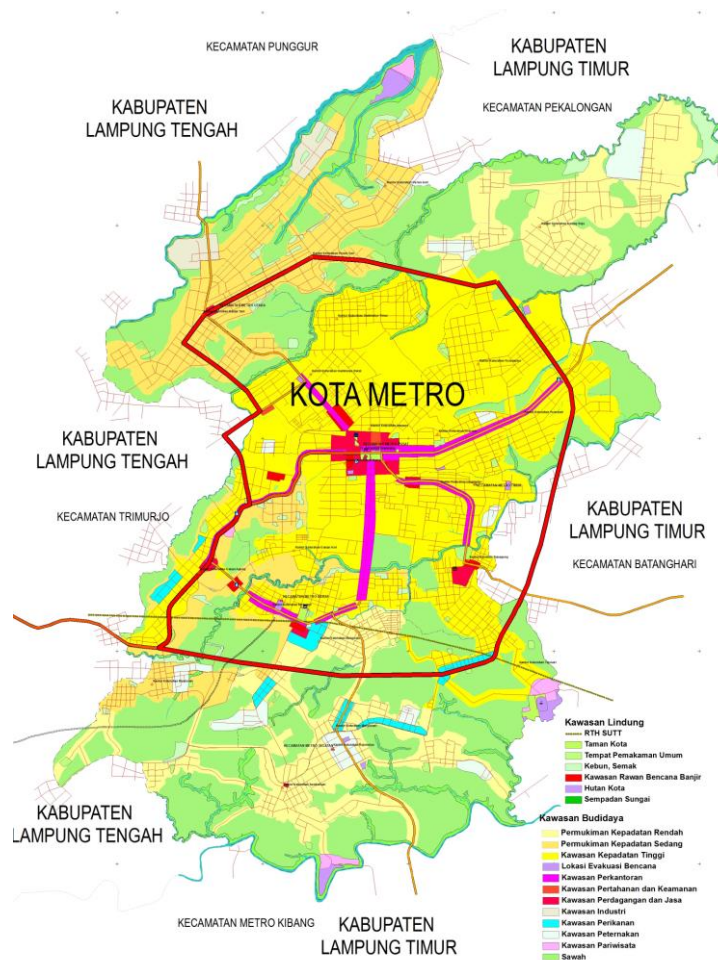
pada bidang pengolahan hasil bumi dengan luasan 10 ha; dan Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro diarahkan di seluruh kecamatan di Kota Metro.

- 5). Kawasan pariwisata, meliputi : obyek-obyek wisata alam (Dam Raman dan Bumi Perkemahan); obyek wisata buatan di sekitar Dam Raman, sekitar Stadion Tejosari dan kawasan Palm Indah; kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh, industri kreatif pendukung kegiatan wisata, dan hiburan lainnya di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan AH Nasution dan Jalan Ahmad Yani.
- 6). Kawasan Ruang Terbuka non Hijau, meliputi : lapangan Samber, Stadion Tejosari, bangunan ibadah, lahan parkir yang terintegrasi dengan ruang pejalan kaki, sarana publik, perkantoran, perdagangan dan jasa yang harus menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.
- 7). Kawasan Ruang Evakuasi Bencana, meliputi : ruang terbuka di Lapangan 22, Lapangan Samber, Taman Merdeka, Masjid Taqwa, dan stadion Tejosari.
- 8). Kawasan peruntukan sektor informal, meliputi : jalur lambat, jalur pejalan kaki, jalur parkir, dan prasarana sarana lainnya bagi PKL.
- 9). Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, meliputi : lahan pertanian sawah irigasi dengan produktivitas 1-2 kali panen dalam setahun di Kecamatan Metro Utara dan kecamatan Metro Selatan yang bertujuan untuk swasembada beras di Kota Metro.
- 10). Kawasan Peternakan, meliputi : Kawasan peternakan skala besar terdapat di Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Selatan; dan kawasan peternakan skala kecil terdapat di Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Pusat.

- 11). Kawasan Budidaya Perikanan, meliputi : Kecamatan Metro Selatan sebagai sentra budidaya ikan lele dan ikan patin dalam skala besar. Sedangkan pada Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara diarahkan sebagai sentra budidaya perikanan air tawar skala menengah dan kecil. Budidaya perikanan kolam air tawar yang tersebar diseluruh kecamatan dengan total luas kolam sebesar 1.718,400 m². Adapun sebaran kolam budidaya ikan terbanyak ada di Kecamatan Metro Selatan yaitu seluas 501.000 m².
- 12). Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi :
- Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Metro Pusat;
 - Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di Kecamatan-Kecamatan Kota Metro;
 - Polisi Resort Kota (Polresta) berada di Kecamatan Metro Pusat;
 - Polisi Sektor (Polsek) yang berada di Kecamatan-Kecamatan Kota Metro.
- 13). Kawasan Pendidikan, meliputi : Kawasan pendidikan diarahkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.
- 14). Kawasan Kesehatan, meliputi : pusat pelayanan kesehatan skala kota yaitu Rumah Sakit Umum Ahmad Yani dan sarana kesehatan skala lokal, yaitu puskesmas rawat inap di masing-masing kecamatan.
- 15). Kawasan Peribadatan, meliputi : pusat pelayanan peribadatan skala kota, pembangunan Islamic Center di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat sebagai pusat pelayanan peribadatan skala kota yang baru, sarana peribadatan skala lokal, yaitu masjid, mushola, gereja, vihara di masing-masing kecamatan.

Kawasan lindung, budidaya, dan rawan bencana, sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 – 2031, digambarkan dalam peta berikut.

Gambar 2.3
Peta Rencana Pola Ruang Kota Metro



c. Wilayah Rawan Bencana

Sebagian wilayah Kota Metro dialiri oleh 2 (dua) sungai utama yaitu Way Bunut dan Way Batanghari sehingga berpotensi menjadi daerah rawan banjir. Banjir yang terjadi di Kota Metro merupakan limpasan dari aliran permukaan yang mengalir di dalam Kota Metro yang secara topografi relatif datar. Banjir yang terjadi selama ini

adalah akibat kesulitan drainase untuk menampung limpasan apabila intensitas hujan cukup tinggi dan ada sebagian wilayah kota yang diakibatkan oleh luapan kedua air sungai tersebut.

Sebagai daerah perkotaan, kawasan banjir di Kota Metro sering terjadi seperti di pusat kota seperti, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Sudirman. Walaupun secara umum genangan banjir tidak lebih dari satu meter dengan lama waktu kurang dari satu jam.

Kejadian banjir di Kota Metro secara umum, disebabkan oleh meluapnya sungai atau saluran drainase utama. Disamping akibat dimensi saluran dan bangunan drainase yang tidak memadai, terjadinya banjir juga disebabkan oleh berkurangnya kapasitas tampung dan kapasitas pengaliran saluran akibat penyempitan di permukaan dan kepentingan komersial serta pendangkalan akibat sedimen dan penumpukan sampah. Banjir terjadi pada pemukiman-pemukiman yang menempati daerah cekungan atau daerah datar. Resiko terjadinya banjir pada masa mendatang cenderung akan meningkat sebagai akibat meningkatnya debit limpasan air permukaan (run-off) sejalan dengan makin luasnya daerah terbangun (urbanized areas).

Tabel 2.4
Lokasi Banjir Kota Metro

No	Lokasi	Tinggi Banjir (m)	Lama Genangan	Luas Genangan (Ha)	Yang Tergenang
1.	Komp. Pasar Margorejo, Kel. Margorejo, Kec. Metro Selatan	0.30	± 3 jam	2	Rumah Penduduk dan Pasar
2.	Jl. Jend. Sudirman (Sekitar SPBU), Kel. Ganjar Agung, Kec. Metro Barat	0.40	± 4 jam	3	Pertokoan dan rumah penduduk
3.	Jl. Imam Bonjol, Gg. Tanjung, Kel. Hadimulyo Timur, Kec. Metro Pusat	0.80	± 5 jam	3	Pertokoan dan rumah penduduk
4.	Jl. Terong (belakang Wihara), Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur	0.70	± 5 jam	4	Rumah dan Sawang
5.	Jl. Ahmad Yani (Komp. Pemakaman Cina & Pasar Tejo Agung), Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur	0.60	± 8 jam	5	Rumah Penduduk
6.	Jl. Sakura (komp. Sumur Bandung), Kel. Metro, Kec. Metro Pusat	0.60	± 6 jam	2	Rumah Penduduk
7.	Jl. Sulawesi dan Jl. Sumbawa (depan TK. Al-Quran), Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat.	0.50	± 3 jam	0.7	Rumah Penduduk
8.	Jl. Hasanudin (depan gereja)	0.50	± 3 jam	1	Pertokoan dan rumah penduduk
9.	Jalan Soekarno – Hatta 2 sekitar SD Tingkat pertigaan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mulyojati	0.50	± 5 jam	1	Rumah Penduduk
10.	Jalan Basuki Rachmat sekitar Puskesmas Yosomulyo	0.50	± 5 jam	1	Rumah Penduduk
11.	Jalan Piagam Jakarta sekitar SMP 9, Kelurahan Mulyosari	0.50	± 6 jam	1	Rumah Penduduk
12.	Jalan Nusantara dan Jalan Proklamasi, Kelurahan Mulyosari	0.50	± 6 jam	1	Rumah Penduduk

d. Demografi

Jumlah penduduk Kota Metro berdasarkan data hasil proyeksi penduduk tahun 2015 adalah 158.415 jiwa yang terdiri dari 79.191 penduduk laki-laki dan 79.224 penduduk perempuan, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,55 persen.

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut diatas, maka diperoleh rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 99,96. Angka tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk laki-laki di Kota Metro hampir sama dengan penduduk perempuan, yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki, dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio
di Kota Metro 2010-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
2010	73.178	72.807	145.985	100,51
2011	74.447	74.109	148.586	100,46
2012	75.727	75.390	151.117	100,45
2013	76.828	76.689	153.517	100,18
2014	78.078	77.914	155.992	100,21
2015	79.191	79.224	158.415	99,96

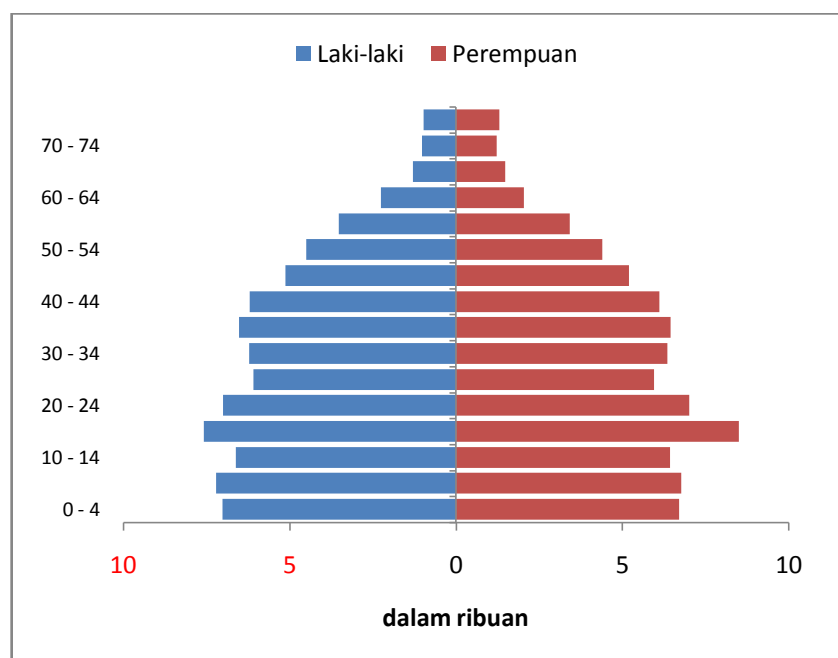
Sumber : BPS Kota Metro (Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan SP 2010)

Karakteristik penduduk yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur dan jenis kelamin atau yang sering disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Struktur umur penduduk Kota Metro didominasi oleh kelompok usia antara 10 sampai 34 tahun yang merupakan tipe piramida penduduk Indonesia secara umum. Sebagian besar penduduk berada dalam

kelompok usia 15-19 tahun. Relatif besarnya jumlah penduduk kelompok usia ini bisa disebabkan banyaknya penduduk yang berasal dari luar Metro yang bersekolah di kota pendidikan ini. Namun yang harus disadari oleh Pemerintah Kota Metro adalah penduduk pada kelompok usia ini akan mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Metro bila tidak ditangani sedini mungkin.

Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat besaran angka ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas). Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2015

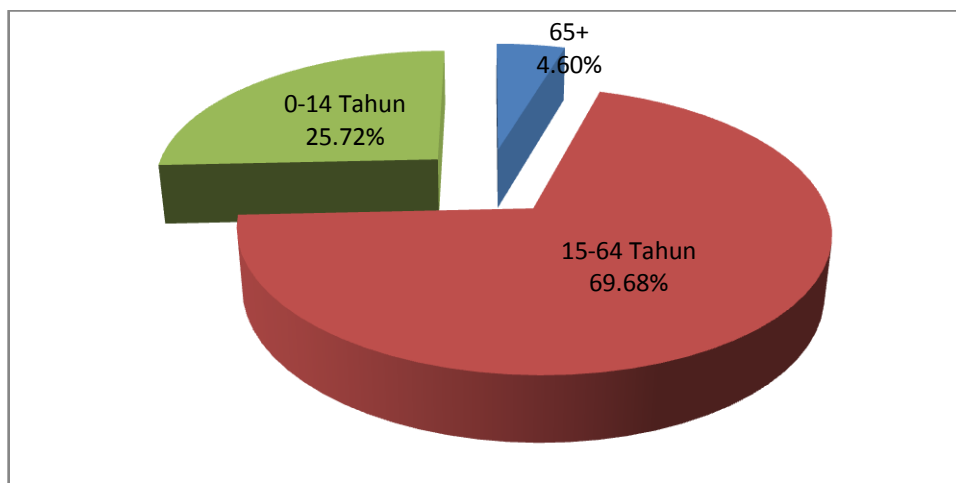


Sumber : BPS Kota Metro, Tahun 2015

Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga dianggap sudah tidak produktif lagi setelah memasuki masa pensiun. Meskipun tidak terlalu akurat, namun rasio ini dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari segi demografis.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Metro pada tahun 2015 adalah 43,51% yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.5
Struktur Penduduk Kota Metro Tahun 2015



Sumber : BPS Kota Metro, Buku Metro Dalam Angka 2014

Permasalahan yang sering muncul di daerah yang sedang berkembang, seperti halnya Kota Metro adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Kota Metro pada tahun 2014 adalah 2.269 jiwa/km².

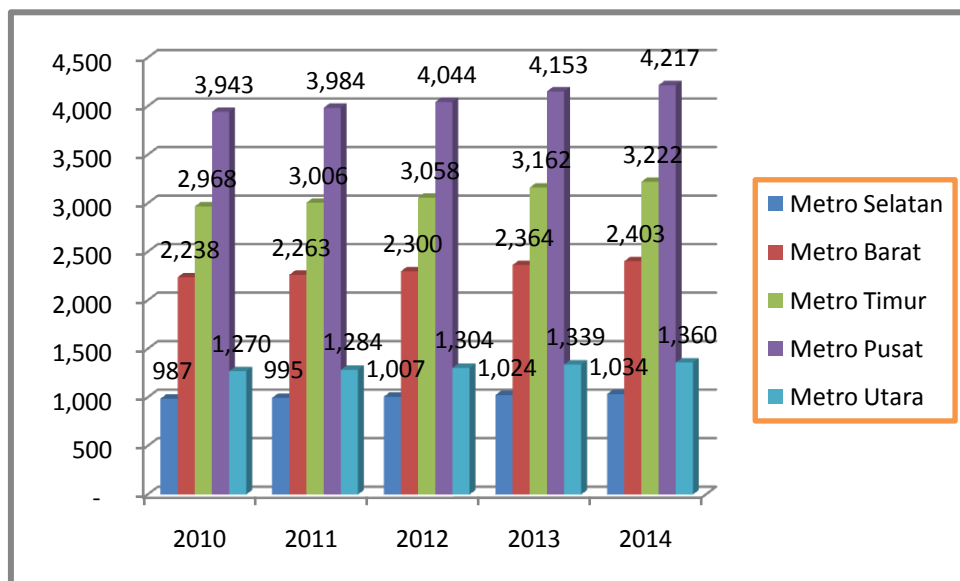
Kecamatan Metro Pusat dengan luas wilayah 11,71 km² merupakan daerah yang paling padat penduduknya yakni 4.217

jiwa/km². Kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang meliputi sekitar 32 persen dari total penduduk Metro. Kecamatan yang menjadi jantung kota dan sebagai pusat pemerintahan serta perekonomian ini, mempunyai sarana prasarana dan fasilitas umum yang cukup lengkap, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat dengan kepadatan sebesar 9.073 jiwa per-kilometer persegi dan kepadatan terendah pada Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan dengan kepadatan sebesar 781 jiwa per-kilometer persegi.

Gambar 2.6

Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Metro 2010-2014

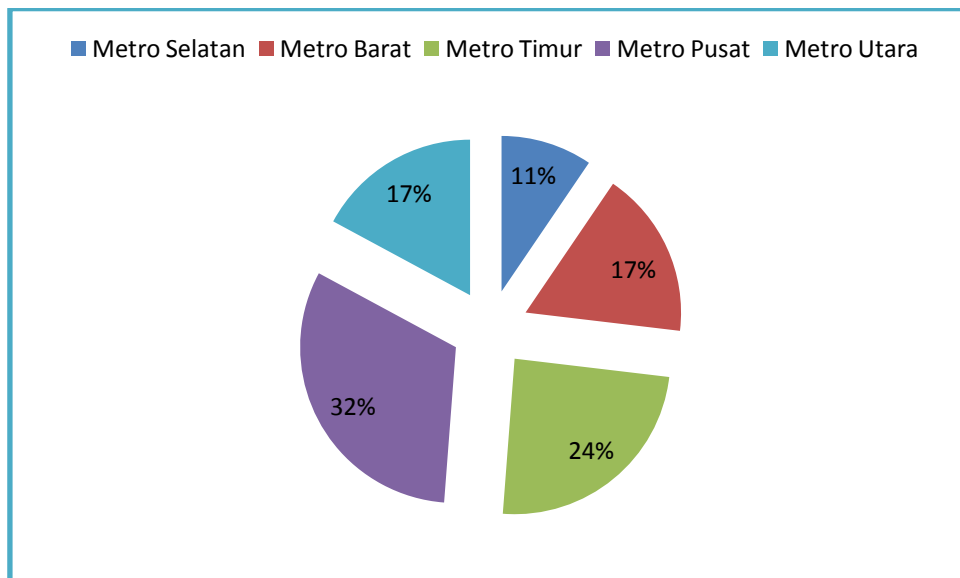


Sumber : BPS Kota Metro, Metro Dalam Angka 2014

Sementara Kecamatan Metro Selatan yang luas wilayahnya 14,33 km², mempunyai jumlah penduduk yang meliputi 10 persen dari total penduduk Kota Metro. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 1.034 jiwa/km². Walaupun sebagian wilayah

Kecamatan Metro Selatan masih merupakan areal persawahan, namun pemukiman penduduk sudah mulai berkembang di kecamatan ini.

Gambar 2.7
Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kota Metro
Tahun 2014



Sumber : BPS Kota Metro, Buku Metro Dalam Angka 2014

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Secara makro keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan beberapa indikator baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Harga Konsumen, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan lain sebagainya.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per-kapita,

indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Dalam kurun waktu tahun 2008 - 2014, kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Metro berfluktuasi pada kisaran 5,21 persen sampai dengan 6,47 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2014 (6,47 persen), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2008 (5,21 persen). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro tahun 2014 sebesar 6,47 persen. Pertumbuhan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,23 persen, dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
PDRB data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro 2008-2014

Tahun	PDRB Kota Metro (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2008	872.698	504.393	5,21
2009	1.017.101	531.202	5,32
2010	1.164.387	562.509	5,89
2011*	1.319.875	598.519	6,40
2012*	1.504.813	634.711	6,05
2013**	1.712.322	674.271	6,23
2014***	1.959.522	714.579	6,47

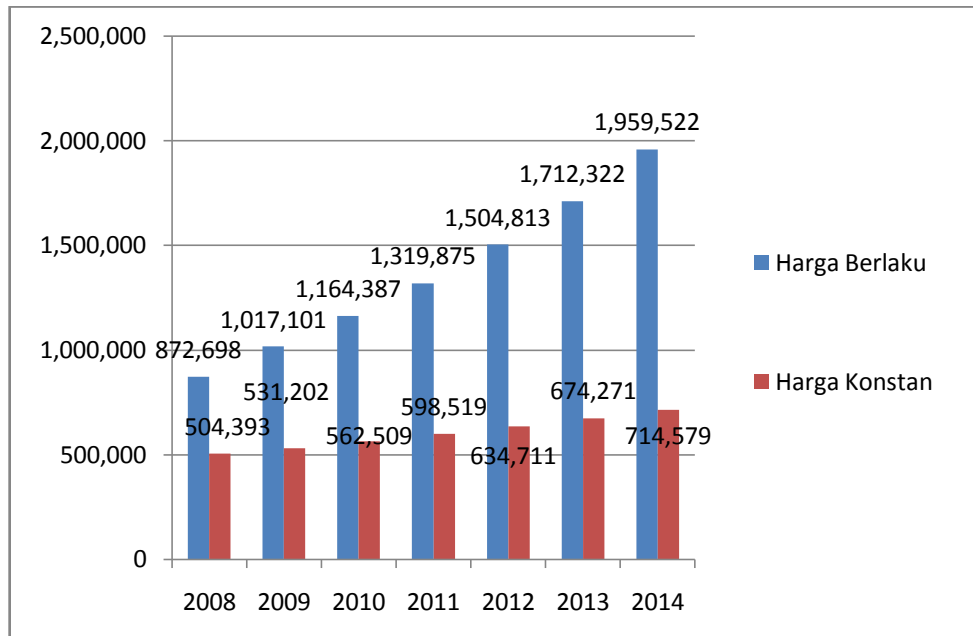
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

Catatan : * Angka Diperbaiki

 ** Angka Sementara

 *** Angka Sangat Sementara (Olah Data Bappeda)

Gambar 2.8
Perkembangan PDRB Kota Metro Tahun 2008-2014
(Dalam Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

Secara umum kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu; Sektor Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan, Perdagangan, hotel dan restoran, Angkutan dan komunikasi, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan Jasa-jasa.

Tabel 2.7
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kota Metro Tahun 2010-2014

No.	Lapangan Usaha/Sektor	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian	6,58	6,53	6,40	6,20	5,98
2	Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri pengolahan	17,03	16,77	16,77	16,67	16,54
4	Listrik, gas dan air bersih	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15
5	Bangunan	6,72	6,52	6,40	6,12	6,34
6	Perdagangan, hotel dan restoran	22,22	22,35	21,8	21,16	20,78
7	Angkutan dan komunikasi	13,44	13,1	13,21	13,6	13,67
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	21,2	21,46	22,05	22,71	23,08
9	Jasa-jasa	12,63	13,1	13,21	13,39	13,44
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

*Catatan : * Angka Diperbaiki*

*** Angka Sementara*

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi. Berdasarkan output dan inputnya kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu:

1. Sektor primer, mencakup sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalian. Input kelompok ini berasal dari alam.
2. Sektor Sekunder, mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Input sektor ini berasal dari sektor primer.
3. Sektor Tersier, mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Input sektor ini berasal dari sektor sekunder dengan outputnya berupa jasa-jasa.

Dari Tabel 2.8 terlihat bahwa PDRB Kota Metro sebagian besar dibentuk oleh sektor tersier yaitu sebesar 82,34 persen dari total PDRB Kota Metro. Hal ini sesuai dengan status Kota Metro sebagai daerah perkotaan yang telah maju, yang biasanya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase Kelompok Sektor Terhadap PDRB Kota Metro
Tahun 2010-2014

No.	Lapangan Usaha/Sektor	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Primer	6,58	6,53	6,40	6,20	5,98
2	Sekunder	23,93	23,46	23,33	22,94	23,03
3	Tersier	69,49	70,01	70,27	70,86	70,99
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

*Catatan : * Angka Diperbaiki*

*** Angka Sementara*

Peranan sektor-sektor di atas dalam pembentukan PDRB Kota Metro disajikan pada tabel 2.7 di atas. Pada tahun 2014, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi yang paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Metro yaitu sebesar 23,08 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan dengan kontribusinya masing-masing sebesar 20,78 persen dan 16,54 persen.

b. Laju Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

Selama tahun 2014 tingkat inflasi di Kota Metro mencapai 6,50% angka ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 12,16%. Selama periode Januari – Desember 2014 dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, 5 kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Selama periode tersebut

kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks terbesar yaitu kelompok transportasi dan komunikasi 14,08%; kelompok bahan makanan sebesar 10,15%; diikuti oleh kelompok kesehatan 8,35%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 5,96%; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,15%. Sementara 1 (satu) kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks dan menahan laju inflasi yakni kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 2,48%; sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tidak mengalami perubahan indeks.

Tabel 2.9
Nilai Inflasi Rata-rata dan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kota Metro Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Rata-rata Pertumbuhan
Inflasi (%)	8,18	3,40	3,85	7,40	6,50	-0,89	40,26%
IHK	106,56	113,53	117,68	124,98	126,89	125,76	

Sumber : BPS Kota Metro, 2015

*Catatan : * Angka Inflasi dan IHK Januari-Maret 2015*

Pada tahun 2015 selama bulan Januari sampai dengan Maret terjadi deflasi sebesar 0,89%. Berdasarkan hasil pemantauan harga oleh BPS, pada bulan Januari 2015 terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 126,89 pada Desember 2014 menjadi 126,67 pada bulan Januari 2015, dan pada bulan Maret 2015 menjadi 125,76.

Selama periode tersebut kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks terbesar adalah dari bahan makanan sebesar 1,02%; kemudian Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,71%; Sandang 0,59%; Kesehatan 0,47%; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,06%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan

indeks adalah Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,08%; dan Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan deflasi sebesar 9,92%.

c. PDRB per Kapita

Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan perkapita yang ditunjukkan oleh nilai PDRB perkapita. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, dimana pada tahun 2008 PDRB perkapita Kota Metro sebesar Rp. 6.219.605 menjadi Rp. 12.536.767 pada tahun 2014.

Tabel 2.10
PDRB per Kapita Kota Metro Tahun 2008-2014

No.	Tahun	PDRB per Kapita (Rp.)
1	2008	6.219.605
2	2009	7.113.189
3	2010	8.004.256
4	2011*	8.975.691
5	2012*	10.075.006
6	2013**	11.153.955
7	2014***	12.536.767

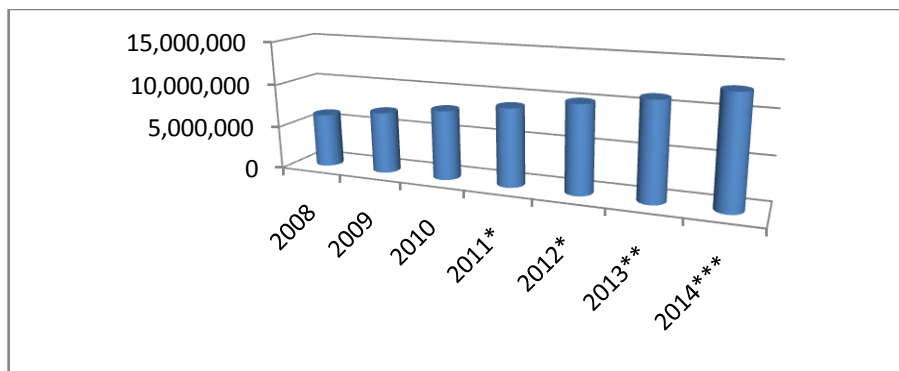
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

*Catatan : * Angka Diperbaiki*

*** Angka Sementara*

**** Angka Sangat Sementara (Olah Data Bappeda)*

Gambar 2.9
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Metro Tahun 2008-2014
Dalam Rupiah (Rp.)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro

Catatan : * Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

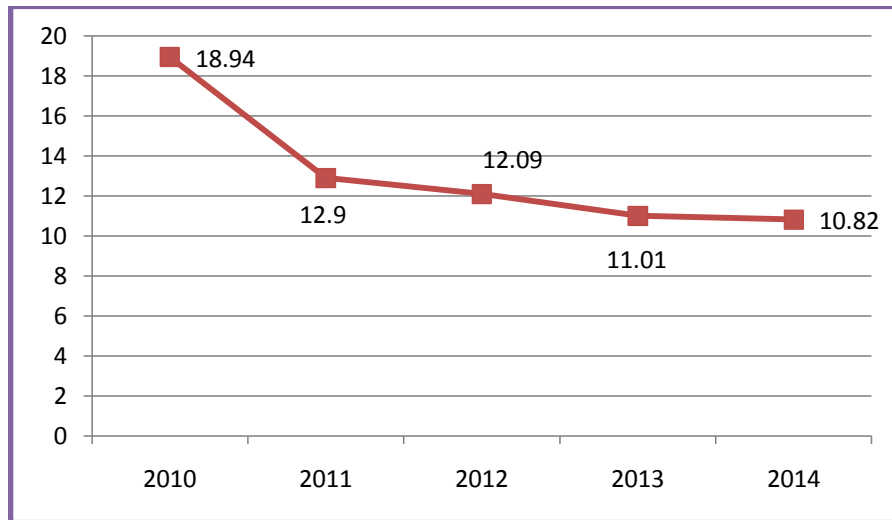
*** Angka Sangat Sementara (Olah Data Bappeda)

d. Persentase Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis karena sudah ada sejak peradaban kuno, karena sifatnya sangat dinamis dan memerlukan penanganan dengan pendekatan inklusif untuk mencapai kesamaan persepsi diantara stakeholder. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kota Metro dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 5 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penanganannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat *local strategies* melalui pelibatan *local stakeholder* sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Persentase jumlah penduduk miskin Kota Metro pada tahun 2014 sebesar 10,82%, angka tersebut terus menunjukkan penurunan dari tahun 2010 yang mencapai 18,94%.

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kota Metro Tahun 2010 - 2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2014

e. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa angka Indeks Gini di Kota Metro berfluktuasi, yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kota Metro dari tahun 2012-2014 berkisar pada ketimpangan pendapatan rendah dan sedang. Pada tahun 2014, angka Indeks Gini di Kota Metro semakin mengecil yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kota Metro semakin mengecil atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata. Angka Indeks Gini tahun 2012 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Indeks Gini Kota Metro Tahun 2012 - 2014

No.	Tahun	Indeks Gini
1.	2012	0,3364
2.	2013	0,4149
3.	2014*)	0,3447

Sumber : BPS Kota Metro, 2015

*) Angka Sementara

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial difokuskan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

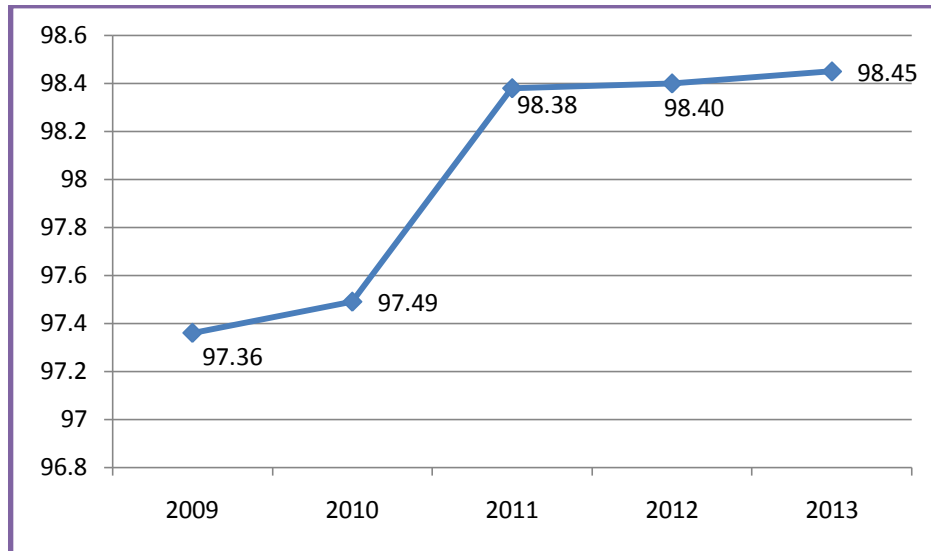
a. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah tingkat buta aksara atau tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan dasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf.

Angka Melek Huruf bagi penduduk di atas 15 tahun di Kota Metro menunjukkan peningkatan, yang berarti ada keberhasilan di dalam program pemberantasan buta huruf, sebagaimana ditunjukkan grafik berikut ini :

Gambar 2.11

**Persentase Penduduk Kota Metro 15 tahun ke atas yang Melek Huruf
Tahun 2009 - 2013**



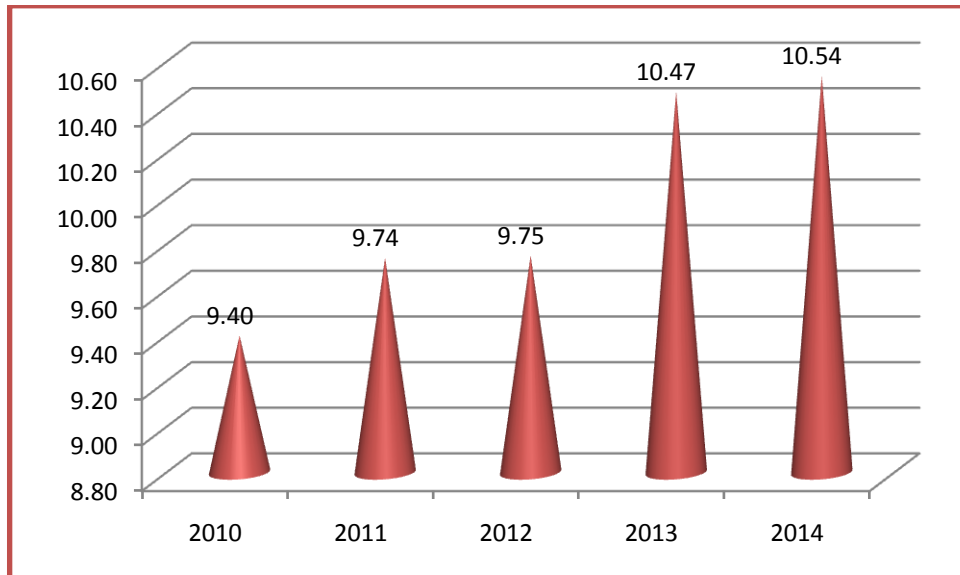
Sumber : BPS Kota Metro, 2014

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata lamanya waktu yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pembelajaran formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Metro pada tahun 2014 adalah 10,54 tahun. Hal ini berarti bila angka 10,54 dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka rata-rata penduduk Kota Metro sudah dapat menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMA.

Menggunakan angka ini dapat diketahui bahwa investasi rata-rata penduduk Kota Metro di bidang pendidikan mencapai 10,54 tahun dan peningkatan angka ini dari tahun ke tahun diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Gambar 2.12
Angka Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun)
Kota Metro Tahun 2010 - 2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2015

c. Angka Partisipasi Kasar

Untuk memahami dan melakukan analisis tentang kondisi pendidikan di suatu daerah, dapat menggunakan 2 (dua) indikator tentang partisipasi sekolah, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kedua ukuran tersebut mengukur partisipasi penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok usia “standar” di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan.

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang

paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APK membagi jumlah siswa dengan tingkat pendidikan tanpa menggunakan batasan kelompok umur. Kondisi ini memungkinkan nilai APK yang melebihi 100%, hal ini sering terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI. Nilai diatas 100% ini terjadi karena masih banyak penduduk dengan kelompok usia dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat SD, atau penduduk yang berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah pada tingkat SD/MI.

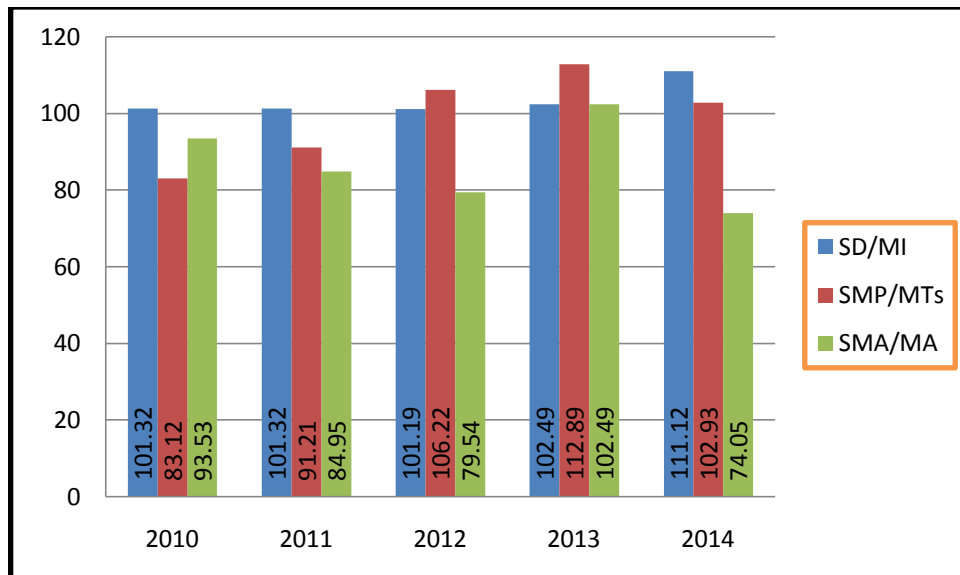
Tabel dibawah ini menunjukkan APK menurut kelompok usia sekolah di Kota Metro periode 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kelompok Usia Sekolah
di Kota Metro Tahun 2010 - 2014

No	Jenjang Pendidikan	APK (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	101,32	101,32	101,19	102,49	111,12
2	SLTP/MTs	83,12	91,21	106,22	112,89	102,93
3	SLTA/MA	93,53	84,95	79,54	102,49	74,05

Sumber : BPS Kota Metro, 2014

Gambar. 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/Mi, SLTP/MTs, SLTA/MA (%) Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2014

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan antar waktu angka partisipasi kasar (APK) di tiga jenjang pendidikan pada tahun 2009-2013 di Kota Metro cenderung bervariasi ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. APK pada jenjang SLTA tampak mengalami penurunan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Sedangkan APK SD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

d. Angka Partisipasi Murni

Meskipun nilai APK cukup besar terutama untuk SD, namun untuk mencerminkan kondisi pendidikan kurang proporsional, karena memasukkan semua penduduk dalam jenjang pendidikan tanpa dibatasi dengan kelompok yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sehingga diperlukan indikator yang mencerminkan partisipasi sekolah, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM).

APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan

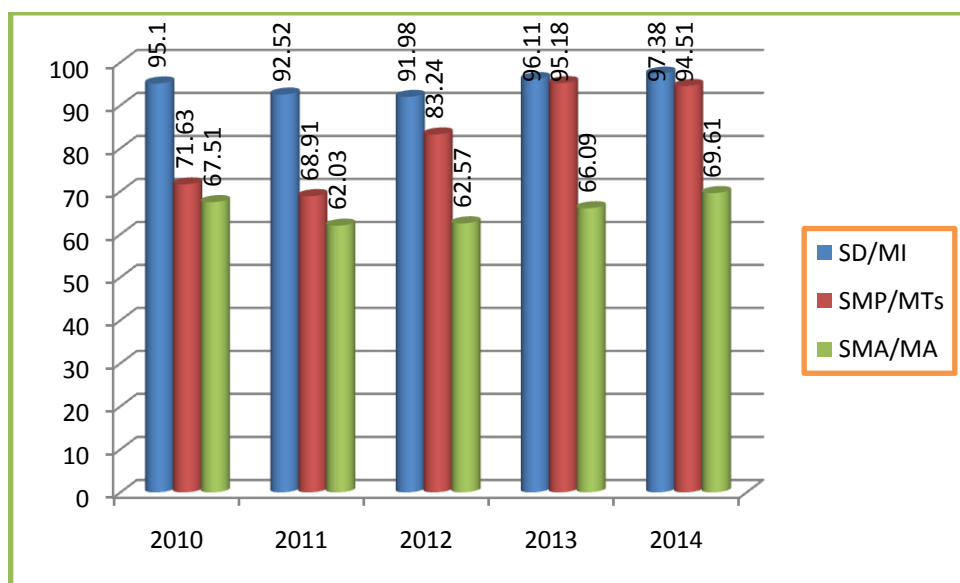
penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya dan dinyatakan dengan persentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Dengan demikian jika dibandingkan dengan APK, maka APM merupakan indikator yang lebih baik.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Metro Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	APM (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	95,10	92,52	91,98	96,11	97,38
2	SLTP/MTs	71,63	68,91	83,24	95,18	94,51
3	SLTA/MA	67,51	62,03	62,57	66,09	69,61

Sumber : BPS Kota Metro, 2014

Gambar. 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi (%) Kota Metro Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2014

Dari gambar di atas terlihat perkembangan antar waktu angka partisipasi murni APM SD/Mi pada tahun 2010-2014 di Kota Metro cenderung fluktuatif, ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014, APK pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan.

e. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Kualitas penduduk pada pendidikan formal dapat juga digambarkan oleh indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan. Hal ini disebabkan tingkat intelektualitas penduduk suatu daerah tercermin dari ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk wilayah tersebut. Semakin tinggi rata-rata ijazah/STTB yang dimiliki penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan dan kecerdasan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.14

Presentase Penduduk Umur 15 Tahun ke-atas menurut tingkat pendidikan yang ditempatkan di Kota Metro Tahun 2010-2013

Pendidikan yang ditamatkan	2010	2011	2012	2013
Tidak punya Ijazah SD	6,50	9,52	7,57	8,44
SD/MI Sederajat	21,80	17,44	17,73	19,15
SMP/MTS Sederajat	24,00	22,09	23,63	24,61
SMA/SMK/MA Sederajat	35,90	36,52	36,74	36,21
D-I/D-II/D-III	3,30	5,03	4,28	5,37
D-IV/S1/S2/S3	8,50	9,40	10,05	6,22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

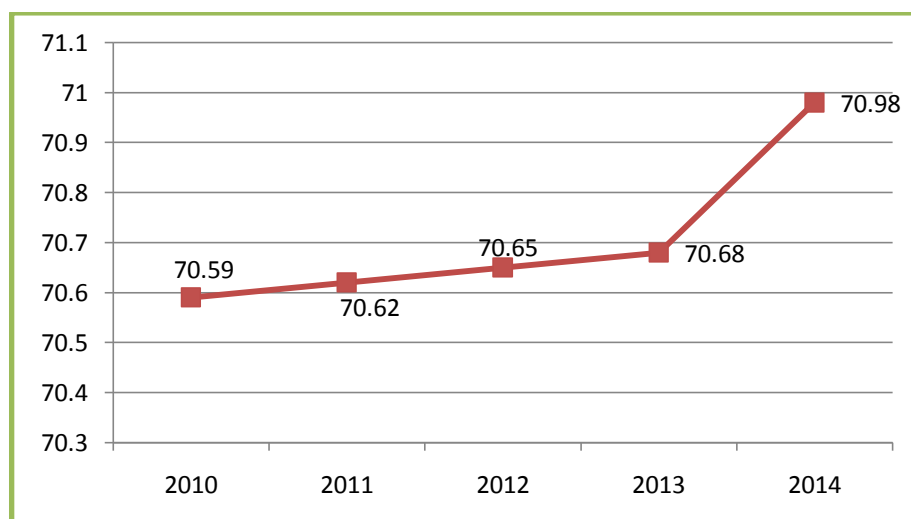
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro 2014

Pada tahun 2013, tingkat pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk Kota Metro yang berusia 15 tahun keatas adalah jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sederajat, yaitu sebesar 36,21 persen. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SMA, persentase penduduk yang menamatkan pendidikannya pada jenjang D-4/S-1 (6,22 persen) ternyata lebih besar daripada jenjang pendidikan D-1/D-2/D-3 (5,37 persen), Hal ini berarti semakin banyak penduduk Metro yang ingin melanjutkan pendidikan sampai tingkat sarjana.

f. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Metro dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Selain itu, AHH juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka Harapan Hidup Kota Metro adalah sebagai berikut :

Gambar 2.15
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Metro
Tahun 2010 - 2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2015

g. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi melalui investasi diharapkan dapat memberi kesempatan kerja seluas-luasnya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta lebih merata pada sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Usaha mikro kecil dan menengah diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 Tahun). Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketidadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan

ketidakstabilan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara.

Memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja merupakan pendukung peningkatan angka partisipasi kerja ini, sehingga menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kota Metro untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Metro.

Tabel 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Metro Tahun 2010 - 2014

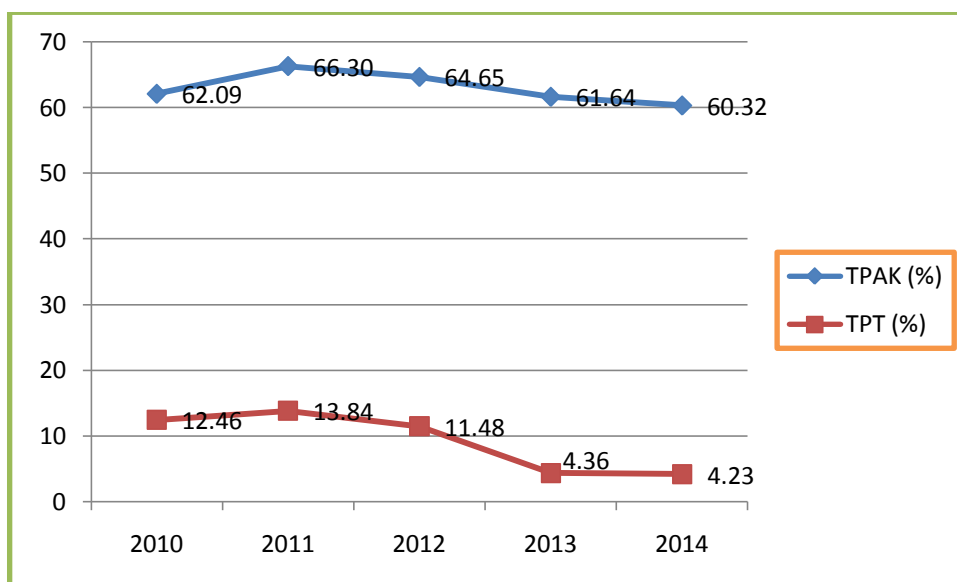
NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	TPT (%)	12,46	13,84	11,48	4,36	4,23
2.	TPAK (%)	62,09	66,30	64,65	61,64	60,32

Sumber : BPS Kota Metro

Tabel di atas menampilkan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2010-2014 di Kota Metro. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa TPAK Kota Metro pada tahun 2014 adalah sebesar 60,32 persen. Hal ini berarti proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah 60,32 persen. TPAK pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 61,64 persen menjadi 60,32 persen.

Berbeda dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapat pekerjaan.

Gambar 2.16
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
menurut TPAK dan TPT di Kota Metro Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kota Metro

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa trend tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2010-2011 di Kota Metro cenderung terjadi peningkatan tetapi pada tahun 2012, TPAK Kota Metro mengalami penurunan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2011, yakni dari 66,30 persen menjadi 64,65 persen. Begitu pula yang terjadi dengan TPT Kota Metro mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, yakni dari 11,48 persen menjadi 4,36 persen di tahun 2013.

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketiga komponen IPM tersebut dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang,

berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan/atau bahkan antar waktu.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode baru, nilai IPM Kota Metro Tahun 2014 sebesar 74,98. Nilai IPM tersebut lebih tinggi dari IPM Tahun 2013 yang bernilai 74,27. Peningkatan ini disebabkan relatif meningkatnya indeks komponen IPM. Peningkatan nilai IPM dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini.

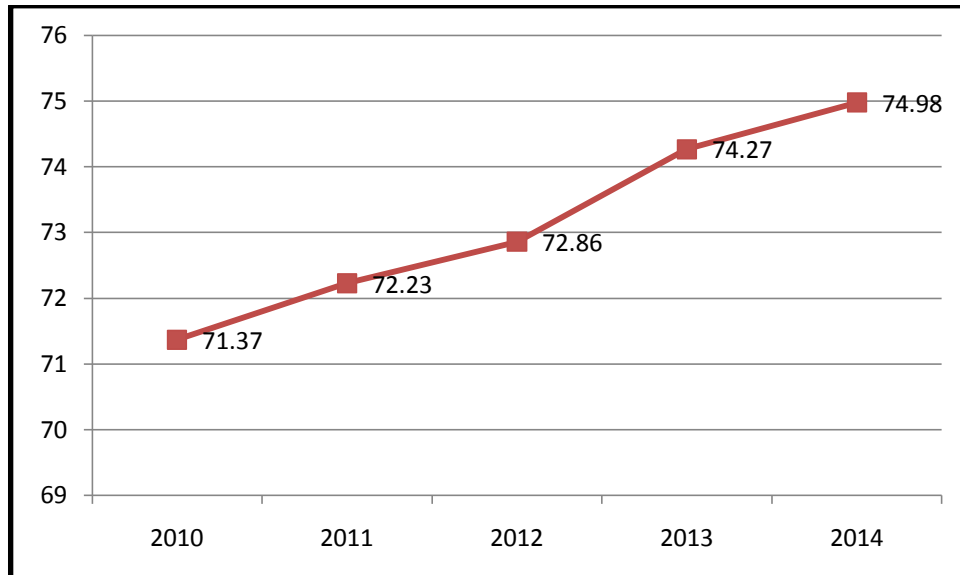
Tabel 2.16
Indeks Komponen IPM Kota Metro Tahun 2010 - 2014

Indeks Komponen	2010	2011	2012	2013	2014*
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,59	70,62	70,65	70,68	70,98
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,74	13,08	13,47	13,85	14,25
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,40	9,74	9,75	10,47	10,54
Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	9,953	10,061	10,281	10,494	10,606
IPM	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98

Sumber : BPS Kota Metro, 2015

Dari gambar berikut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro
Tahun 2010 - 2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2015

Sejak tahun 2010 hingga 2014 nilai IPM Kota Metro merupakan yang tertinggi diantara 14 (lima belas) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yang berkisar antara nilai terendah 58,71 (Kabupaten Mesuji) dan tertinggi 74,98 (Kota Metro) pada tahun 2014. Nilai IPM tersebut bahkan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai IPM Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Nilai IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2010 - 2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.17
IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,
Tahun 2010 – 2014

Kabupaten/Kota	IPM				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Lampung Barat	60,93	61,92	62,51	63,21	63,54
2. Tanggamus	60,09	60,63	61,14	61,89	62,67
3. Lampung Selatan	61,07	61,95	62,68	63,35	63,75
4. Lampung Timur	63,23	64,10	65,10	66,07	66,42
5. Lampung Tengah	64,14	64,71	65,60	66,57	67,07
6. Lampung Utara	61,82	62,67	62,93	64,00	64,89
7. Way Kanan	61,27	62,04	62,79	63,92	64,32
8. Tulang Bawang	63,21	63,67	64,11	64,91	65,83
9. Pesawaran	58,64	59,44	59,98	60,94	61,70
10. Pringsewu	*	64,86	65,37	66,14	66,58
11. Mesuji	*	57,32	57,67	58,16	58,71
12. Tulang Bawang Barat	*	60,13	60,77	61,46	62,46
13. Pesisir Barat	*	*	*	58,95	59,76
14. Bandar Lampung	71,11	72,04	72,88	73,93	74,34
15. Metro	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98
Provinsi Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42

Sumber : BPS Provinsi Lampung

*) masih tergabung dengan kabupaten induk

Dari tabel di atas telah terlihat perbandingan nilai IPM Kota Metro baik perbandingan antar waktu maupun perbandingan antar wilayah. Pencapaian tersebut telah menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Metro terus dilaksanakan dengan berlandaskan pada titik tolak konsep pembangunan manusia seutuhnya yang merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup

penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni budaya dan olahraga difokuskan pada sektor kebudayaan dan sektor pemuda dan olahraga.

a. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Tabel berikut menggambarkan jumlah sanggar kesenian di Kota Metro pada tahun 2013.

Tabel 2.18
Jumlah Sanggar Kesenian per-Kecamatan
se- Kota Metro Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Sanggar
1.	Metro Pusat	15
2.	Metro Utara	16
3.	Metro Barat	21
4.	Metro Timur	9
5.	Metro Selatan	13

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

b. Pemuda dan Olahraga

Perbaikan kualitas hidup masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikannya. Semua yang kita butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita penuhi melalui pendidikan. Pendidikan itu sendiri terdiri atas setidaknya dua alur sistematis yaitu pendidikan formal dan non formal. Dari aspek pendidikan non formal karakteristik lingkungan sangat menentukan akhir proses serta kemungkinan keberlanjutan sebuah

program pembangunan. Selain budaya, olahraga juga menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.19
Banyaknya Kelompok Kegiatan Olahraga/Club Menurut
Cabang Olahraga di Kota Metro

No.	Cabang Olahraga	Jumlah
1.	Sepak Bola	23
2.	Bola Voli	20
3.	Bulu Tangkis	11
4.	Bola Basket	9
5.	Tenis	5
6.	Futsal	6
7.	Renang	3
8.	Tenis Meja	21
9.	Bela Diri	13
10.	Bilyard	4

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

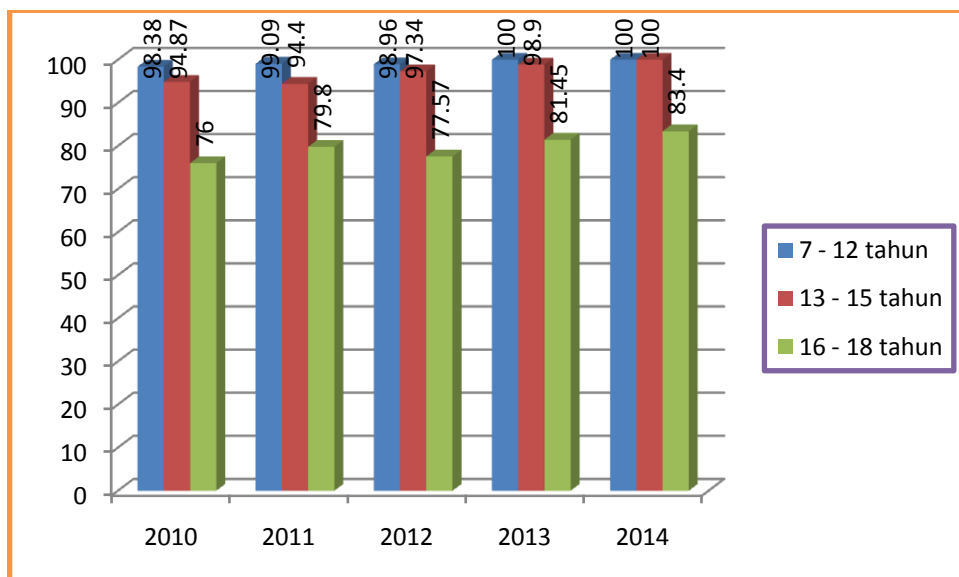
Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

1). Angka Partisipasi sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13 – 15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, dan 16 – 18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah.

Gambar 2.18
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut
Kelompok Usia Sekolah (%) di Kota Metro Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kota Metro, 2015

Pada tahun 2014, APS penduduk usia 7 - 12 tahun dan usia 13 – 15 tahun yang bersekolah mencapai 100 persen. Ini berarti bahwa semua penduduk yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun sudah mengenyam pendidikan semua. Pada gambar diatas juga ditunjukkan bahwa APS untuk kelompok umur 16 – 18 tahun masing-masing sekitar 83,4 persen. Bila dilihat dari perkembangannya ternyata pada jenjang pendidikan usia 16 – 18 tahun terjadi kenaikan sekitar 1,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Metro Tahun 2010 - 2013

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1.	Pendidikan Dasar	40	41	38,89	69
2.	Pendidikan Menengah	22	26	25,03	61

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2013 rasio ketersediaan gedung sekolah pendidikan dasar terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan dari 38,89 menjadi 69 pada tahun 2013. Rasio gedung sekolah pendidikan menengah pada tahun 2012 adalah sebesar 25,03 setiap 10.000 penduduk usia pendidikan menengah, dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 61.

3) Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid

yang ada di Kota Metro, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kota Metro dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kota Metro Tahun 2010 - 2013

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	Rasio SD/MI	6,78	6,50	6,79	6,65
2	Rasio SMP/MTs	10,32	9,98	10,04	8,08
3	Rasio SMA/MA/SMK	9,55	8,97	9,36	9,28

Sumber : BPS Kota Metro, 2014

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 6,65 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 6-7 anak dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2013. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tahun 2012 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 10 dan pada tahun 2013 turun menjadi 8. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/MTs mengajar 32 siswa.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada tahun 2012 masih tetap sama pada tahun 2013. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMA/SMK mengajar 32 siswa.

b. Kesehatan

Di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

1). Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan proporsi bayi meninggal setelah dilahirkan dan belum cukup mencapai umur satu tahun per 1.000 kelahiran. Cara menghitung angka kematian bayi adalah : $\text{angka kematian bayi (0-12 bln)} = \frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{jumlah bayi}} \times 1000$.

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu merupakan cerminan status kesehatan masyarakat terutama kesehatan wanita, juga menggambarkan status gizi, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan anthropometri yang menggunakan indeks berat badan per umur (BB/U). Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.22
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	angka	8,03	8,03	0,4	0,9
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka	6,8	7,4	3,6	4,9
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka	0,31	0	0,6	0,3
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	angka	154	145	148	60,73
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	%	89	68,70	92,50	100
Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100
Angka Usia Harapan Hidup	angka	72.22	72.22	72.89	72.98
Persentase Balita Gizi Buruk	%		0,59	0,04	0,00

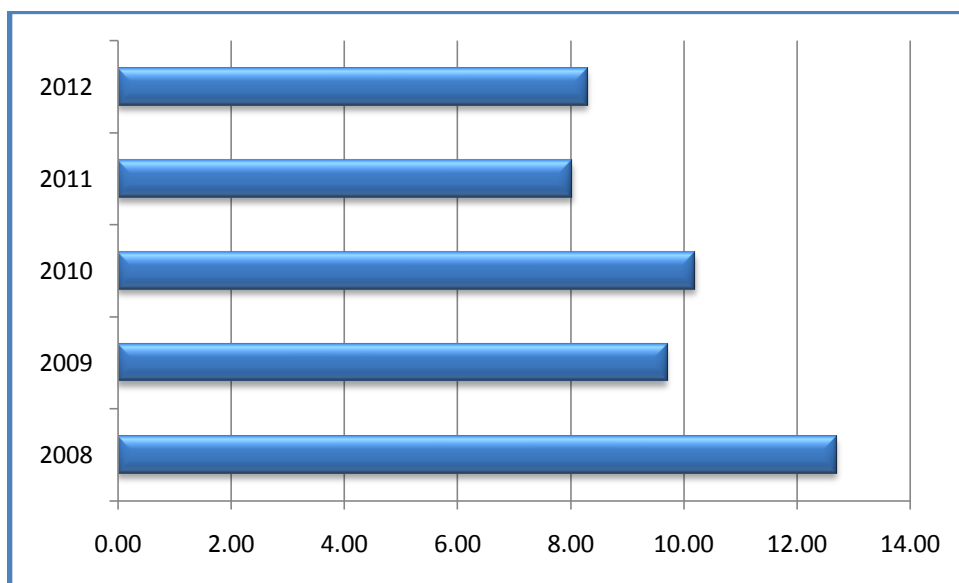
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro, 2014

Beberapa penyebab angka kematian bayi ini adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan asphyxia (sesak nafas) serta pneumonia. Jumlah kasus balita gizi buruk sejak tahun 2007-2011 cenderung meningkat. Sedangkan jumlah Balita Bawah Garis Merah (BGM) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, hal ini perlu diwaspadai karena status BGM berpotensi untuk beralih ke status Gizi Buruk jika tidak mendapat penanganan yang memadai.

Penyebab kematian ibu di Kota Metro disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan/Post Partum Hemorrhage dan eklamsia. Perdarahan umumnya dipengaruhi kelainan dan infeksi uterus, robekan jalan lahir, anemia berat, partus lama, ataupun kesalahan dalam proses persalinan.

Gambar. 2.19

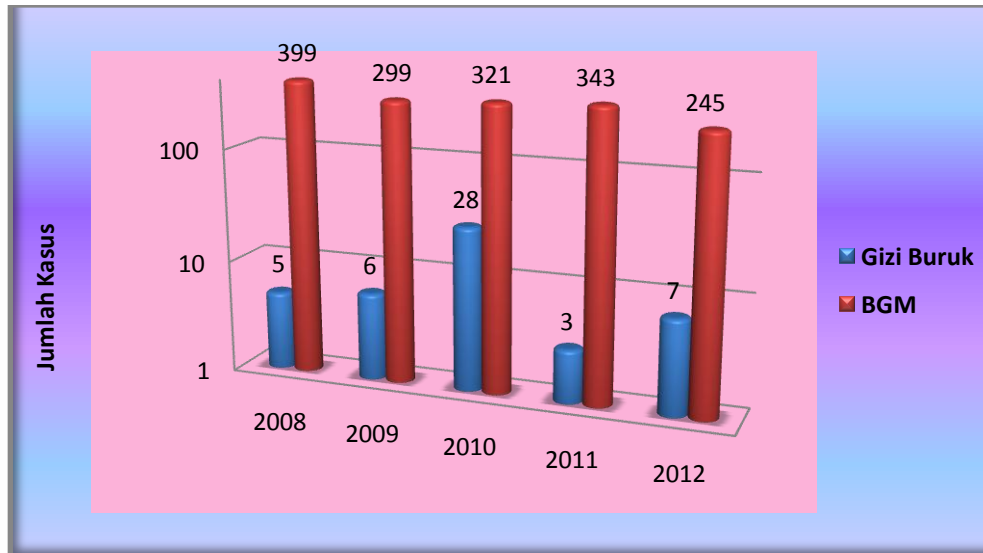
Perkembangan Perkiraan Angka Kematian Bayi (Per- 1000 Kelahiran Hidup) di Kota Metro Tahun 2008-2012



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Dari gambar di atas perkembangan angka kematian bayi di Kota Metro dari tahun 2008-2012 cenderung terjadi penurunan. Dengan demikian perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir cenderung membaik.

Gambar. 2.20
Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk dan Jumlah Kasus BGM
Kota Metro Tahun 2008-2012



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Dari gambar di atas perkembangan jumlah balita gizi buruk cenderung menurun dan jumlah kasus BGM di Kota Metro tahun 2008-2012 terlihat fluktuatif. tetapi jumlah kasus BGM dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan naik. Hal ini perlu diwaspadai karena status BGM berpotensi untuk beralih ke status gizi buruk jika tidak mendapat penanganan yang memadai serta pendekatan program kegiatan yang tepat.

2). Rasio Tenaga Kesehatan di Kota Metro

Adapun rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tergambar dalam tabel berikut :

Tabel. 2.23
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk
Kota Metro Tahun 2013

No	Jenis Tenaga	Jumlah Tenaga	Rasio Per 100.000 Penduduk	
			Kota Metro Th 2013	Renstra Depkes Th 2010-2014
1	Dokter Spesialis	46	30	5
2	Dokter Umum	83	54	14
3	Dokter Gigi	16	10	4
4	Perawat	536	347,95	65
5	Bidan	163	209,68	43
6	Apoteker	39	25	5
7	Sarjana Kesmas	14	9	11
8	Sanitarian	21	13	14
9	Gizi	24	15	11
10	Teknisi Medis	9	5	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro

Bila dilihat dari rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk menunjukkan bahwa rasio jenis tenaga terbesar adalah rasio tenaga perawat yaitu sebesar 347,95 per 100.000 penduduk (target nasional 2014 adalah 65 per 100.000 penduduk). Sedangkan rasio terendah adalah profesi teknisi medis dengan rasio 5 per 100.000 penduduk (Target nasional 6 per 100.000 penduduk).

Dari tabel rasio di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kecukupan tenaga kesehatan sudah memenuhi target. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih kekurangan tenaga, hal ini dikarenakan rasio sarana kesehatan sangat tinggi sehingga perlu tenaga kesehatan yang lebih agar jumlah tenaga kesehatan di sarana kesehatan seperti puskesmas sesuai dengan jumlah yang ada.

c. Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Metro dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Metro yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 133 km,

dan pada tahun 2014 mencapai angka 261,81 km. Terdapat peningkatan angka yang cukup signifikan antara tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013.

Indikator kedua adalah kondisi jembatan dalam keadaan baik, dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi, pada tahun 2014 sebanyak 55 unit jembatan dalam kondisi baik, meningkat 1 unit dibandingkan tahun 2013. Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kota Metro pada tahun 2014 sepanjang 505 km, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya sepanjang 450 km.

Indikator keempat adalah kondisi turap/talud/bronjong dalam keadaan baik, tahun 2014 sebesar 63,93 persen, menurun apabila dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 80 persen. Indikator kelima adalah rasio jaringan irigasi, pada tahun 2014 sedikit mengalami peningkatan, dari 35,40 di tahun 2013 menjadi 36,20.

Indikator terakhir adalah cakupan pelayanan air bersih, di tahun 2014 meningkat secara signifikan, dari 750 SR di tahun 2012 dan 2013 menjadi 3.438 SR di tahun 2014. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum.

Tabel 2.24
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	2011	2012	2013	2014
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	235,69	249,21	133	261,81
2. Jembatan dalam kondisi baik (unit)	56	58	54	55
3. Drainase dalam kondisi baik (km)	407,56	412,83	450	505
4. Turap/talud/bronjong dalam kondisi baik (%)	44	48,07	80	63,93
5. Rasio jaringan irigasi (%)	34,42	35,12	35,40	36,20
6. Cakupan pelayanan air bersih (SR)	310	750	750	3.438

Sumber : Dinas PU dan Perumahan Kota Metro

d. Perumahan

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan adalah rumah layak huni. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 68% pada tahun 2013, meningkat menjadi 68,30% pada tahun 2014.

Indikator urusan perumahan Kota Metro tahun 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	2011	2012	2013	2014
Rasio Rumah layak huni (%)	75	67,50	68	68,30

Sumber : Dinas PU dan Perumahan Kota Metro

e. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, dan perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan RPJMD Kota Metro tahun 2010-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	ada	ada	ada
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	ada	ada	ada	ada
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada	ada	ada	ada
4. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100

Sumber : BAPPEDA Kota Metro

f. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Pada tahun 2014 rasio kendaraan umum yang mengurus izin trayeknya meningkat menjadi 36 persen dari 19 persen pada tahun 2013, hal ini disebabkan masa berlaku izin trayeknya habis pada tahun 2014, sehingga banyak yang mengajukan izin baru.

Tabel 2.27
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
1. Rasio Izin Trayek (%)	26,67	19	19	36

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Metro

g. Lingkungan Hidup

Kota Metro memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang bersih dan sehat perlu dijaga. Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui persentase status mutu air, dimana pada tahun 2014 mengalami kenaikan status mutu air, dari semula 20% pada tahun 2013 menjadi 21%. Upaya yang lain adalah melalui penanaman pohon untuk konservasi, dari tahun 2013 hingga 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2013 sebanyak 7.185 batang menjadi 15.376 batang pada tahun 2014.

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah penanganan sampah. Penanganan sampah pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 70% dari semula 64% pada tahun 2013. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

No.	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Persentase Status Mutu Air (%)	10	8	20	21
2.	Jumlah Pohon yang Ditanam untuk Konservasi (batang)	35.000	6.049	7.185	15.376
3.	Persentase Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup (%)	100	100	50	18
4.	Persentase Penanganan Sampah (%)	60	65	64	70
5.	Penghargaan Adipura yang Diterima	0	1	1	0
6.	Jumlah Kelurahan yang sudah Menerapkan 3R (kelurahan)	3	3	3	5
7.	Jumlah PJU dalam Kondisi Baik (Lampu)	1.883	1.900	1.690	2.200

Sumber : Dinas Tata Kota Pariwisata dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, khususnya untuk pelayanan kartu tanda penduduk. Hal ini terlihat dari dari kepemilikan KTP atau rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2012 sebesar 97,00% meningkat menjadi 97,79% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh implementasi UU No 23 Tahun 2006, yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan adanya perekaman KTP elektronik yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011, dimana semua wajib KTP diundang ke kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

i. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Metro sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
1. Persentase Peserta KB Aktif (%)			90,20	

Sumber : BKKB PP Kota Metro

j. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Sosial
Tahun 2011-2014

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	7,62	57,00	70,42	95,49

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.

k. Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN. Dari pencari kerja terdaftar yang menunjukkan angka 27,06% di tahun 2013, dan 42,4% di tahun 2014. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan angka yang cukup rendah, yaitu 4,45% di tahun 2013 dan tahun 2014.

Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2011-2014 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Tahun 2011-2014

Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,08	13,83	4,45	4,45
Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	33,21	26,01	27,06	42,4
Rasio Penduduk Bekerja	Rasio	0,91	0,86	0,96	0,96

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja urusan wajib ketenagakerjaan cukup baik dalam menjaga iklim tenaga kerja di Kota Metro. Kondisi ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah industri kreatif yang muncul tahun 2014 mampu menciptakan lapangan kerja di Kota Metro.

I. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kota Metro adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Persentase koperasi aktif dari tahun 2011 hingga 2014 selalu meningkat, walaupun tidak signifikan namun menunjukkan perkembangan yang positif. Begitupun halnya dengan persentase usaha mikro aktif, usaha kecil aktif, dan jumlah lembaga keuangan mikro menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat dari tahun 2011 hingga 2014. Rata-rata omzet usaha mikro mempunyai hasil yang berfluktuasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, namun tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Perkembangan perkoperasian dan usaha mikro di Kota Metro tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1. Persentase Koperasi Aktif	%	65,47	65,59	66	66,5
1. Persentase Usaha Mikro Aktif	%	90	91	91	93
2. Persentase Usaha Kecil Aktif	%	100	100	100	100
3. Rata - rata Omset - Usaha Mikro	Juta Rp/ Tahun	23,220	102,360	13,828	293,328
4. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro	Unit	118	423	428	451

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro

m. Penanaman Modal

Peningkatan iklim usaha dan investasi di Kota Metro sangat ditentukan oleh peraturan dan perijinan yang pasti. Investor sangat mengharapkan kepastian peraturan dan lamanya pengurusan perijinan sehingga investor bisa menghitung semua biaya pengeluaran dengan pasti. Dibutuhkan sistem perijinan yang lebih baik untuk memudahkan para investor untuk mengurus ijin. Untuk itu diperlukan perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak perijinan.

Pada Tahun Anggaran 2013, KPMPTSP telah melakukan pengadaan perangkat pendukung dalam bentuk pengadaan komputer dan perangkat lainnya untuk memudahkan mengurus ijin dan memudahkan investor memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan berkurangnya waktu proses perijinan.

Tabel 2.33
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Penanaman Modal
Tahun 2011-2014

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014
Rata-Rata Lama Proses Perijinan (hari)	8	6	5	5

Sumber : KPM-PTSP Kota Metro

n. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah event kesenian/kebudayaan	event	3	3	3	11
Jumlah penghargaan dan kerjasama bidang budaya, seni dan olahraga	Macam	19	17	18	31

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro

Dari Tabel 2.34 di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program untuk Urusan Wajib kebudayaan sejak Tahun 2011 s.d. 2014 secara keseluruhan relatif mengalami kenaikan untuk masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015.

Peningkatan Kinerja yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 dimana Indikator Jumlah Event Kesenian/Kebudayaan yang sebelumnya hanya mengadakan dan mengikuti 3 event, pada tahun 2014 telah mengadakan dan mengikuti 11 event, demikian juga dengan indikator jumlah penghargaan dan kerjasama bidang budaya dan seni juga mengalami kenaikan signifikan di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa iklim berkesenian dan kecintaan terhadap kebudayaan di lingkungan masyarakat Kota Metro sudah semakin tinggi.

o. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan kepemudaan dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk memfasilitasi kegiatan di masyarakat maupun di sekolah.

Tabel 2.35
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah penghargaan dan kerjasama bidang budaya, seni dan olahraga	19	17	18	31

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro

Dari Tabel 2.35 di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana indikator jumlah penghargaan dan kerjasama bidang olahraga juga mengalami kenaikan signifikan di tahun 2014.

p. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Stabilitas keamanan adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kota Metro juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Peran aktif deteksi dini komunitas intelijen sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keamanan terutama menjelang Pilkada tahun 2015.

Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan. Sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan peran Kominda melalui otonomi daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

Kondisi politik, benturan antar kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan maupun paska Pilkada dapat mengganggu pembangunan, dan stabilitas keamanan. Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan SE MENDAGRI NO: 330/3757/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012.

Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah

meningkat. Dampak positif lain yang muncul adalah turut meningkatnya angka partisipasi politik dalam Pilkada 2015.

q. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah didukung adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, Pemerintah Kota Metro setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Metro sebagai amanat pelaksanaan pemerintahan umum telah melaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah yang meliputi penyuluhan pendidikan politik pada masyarakat, koordinasi diskusi politik, pembinaan wawasan kebangsaan, forum komunikasi antar partai politik dan verifikasi bantuan parpol. Dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan meminimalisir adanya konflik sosial juga melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas). Pengembangan kehidupan demokrasi dilaksanakan dengan memfasilitasi pelaksanaan pilpres maupun pileg.

Capaian hasil penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Indikator Kepemerintahan Kota Metro Tahun 2011 - 2014

No.	Indikator Kinerja	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Persentase Raperda yang diajukan terhadap total Raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setiap tahun (%)	11	13	80	66
2.	Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target PAD (%)	100,22	111,39	118,32	111,16
3.	Jumlah dan Macam Pajak Daerah (jenis)	6	9	10	10
4.	Jumlah dan Macam Retribusi Daerah (jenis)	18	18	17	17
5.	Persentase Potensi Penerimaan Pajak yang dapat digali (%)	0,09	0,12	0,14	0,14
6.	Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha (Perda)	24	6	13	14
7.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Rasio Tingkat Pendidikan Aparatur : - S1 - S2 - S3	49,45 3,44 0,04	52,33 4,02 0,04	49 3,70 0,02	49,85 5,40 0,02
9.	Rasio Rumah Ibadah	0,23	0,30	0,42	

Sumber : Laporan Kinerja Kota Metro Tahun 2014, 2015

r. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2011 – 2014 mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

Untuk jumlah LPM dari tahun 2011 – 2014 rata-rata meningkat, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka/transparan.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Tahun 2011-2014

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kelompok Binaan LPM (kelompok)	22	60	60	66
Jumlah Kelompok Binaan PKK (kelompok)	185	186	186	263

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro

s. Perpustakaan dan Arsip

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kota Metro senantiasa menambah jumlah koleksi pustaka.

Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Banyaknya pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	61.000	73.000	48.621	55.262

Sumber : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Metro

t. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran.

Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1. Intensitas updating website milik Pemda	Kali/tahun	120	120	120	124
2. Persentase jumlah website SKPD	%	17,86	22,33	80	100

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Metro

u. Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin tersedianya dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata diseluruh wilayah, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Produksi pangan nasional sebagian besar merupakan masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan meringankan masyarakat dan kemiskinan.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka memenuhi kecukupan pangan tersebut, pembangunan ketahanan pangan merupakan suatu keharusan.

Tabel 2.40
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
Persentase Ketersediaan Pangan	88,33	90,90	92,77	63,86

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro

Persentase ketersediaan pangan dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan, namun terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh musim tanam yang hanya berlangsung satu kali akibat perbaikan saluran irigasi primer. Akan tetapi kebutuhan pangan masih dapat dipenuhi akibat dari keberhasilan penganeekaragaman bahan pangan pokok serta pemanfaatan lahan pekarangan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan difokuskan pada sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, serta ketransmigrasian.

a. Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Pada tahun 2014 produktifitas padi dan bahan pangan lainnya sebesar 60,19 kw/ha, menurun jika dibandingkan tahun 2013. Penurunan produktivitas tersebut karena selain adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama tikus dan penggerek batang sehingga terjadi penurunan produktivitas di periode panen Juli-Desember 2014. Hal tersebut juga terjadi karena keterlambatan pemupukan yang dilakukan petani akibat keterlambatan penyediaan pupuk bersubsidi periode April-Agustus 2014, sehingga terjadi penurunan produktivitas padi periode Juli-Desember 2014. Perkembangan indikator pertanian tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
Produksi Padi (ton)	26.507	24.985	27.070	19.155,24
Produksi Jagung (ton)	4.214	1.865	2.254	3.510
Produksi Ubi Kayu (ton)	229	2.050	2.187	8.161,85
Populasi Ternak Sapi Potong (ekor)	5.789	5.979	5.997	5.949
Populasi Ternak Kambing (ekor)	9.542	10.029	10.069	9.972
Populasi Ayam Kampung, Petelur, Pedaging (ekor)	1.239.972	1.474.473	1.365.709	1.276.243

Sumber : Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Metro

b. Pariwisata

Kota Metro pada saat ini telah memprogramkan pengembangan pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata yang nantinya merupakan salah satu sarana hiburan bagi masyarakat. Sarana hiburan tersebut dapat berupa ruang terbuka hijau, yang merupakan paru-paru kota. Taman Merdeka Kota Metro selain berfungsi sebagai sarana hiburan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang seperti tempat bermain dan berolahraga, juga dapat berfungsi sebagai *landmark*. Dam Raman yang berada di utara, merupakan salah satu obyek wisata masyarakat Kota Metro.

Sedangkan even-even tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro yang berkaitan dengan promosi wisata, diantaranya adalah Festival Kota Metro dan Pameran Pembangunan Kota Metro, selain itu pula ikut serta secara aktif dalam Pameran Pembangunan Tingkat Provinsi.

Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Kota Metro, pada tahun 2012, Pemerintah Kota Metro telah menyusun kebijakan

berupa penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD) Kota Metro.

Tabel 2.42
Obyek Wisata di Kota Metro

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Aktivitas Wisata	Jenis Wisata
1.	Taman Wisata Dam Raman	Purwosari, Metro Utara	Bendungan air dan pemandangan alam	Wisata Alam
2.	Taman Merdeka Kota Metro	Metro, Metro Pusat	Taman rekreasi	Wisata Buatan
3.	Bumi Perkemahan Pramuka	Sumbersari, Metro Selatan	Pemandangan alam	Wisata Alam
4.	Taman Wisata Palem Indah	Ganjar Agung, Metro Barat	Pemancingan dan Rekreasi	Wisata Buatan
5.	Sawah Bertingkat	Metro Selatan	Panorama	Wisata Alam
6.	Gua Lawa	Metro Selatan	Gua alam	Wisata Alam

Sumber : Selayang Pandang Kota Metro, 2013

c. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam dari tahun 2011 hingga 2013 cenderung meningkat, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan pada tahun 2014 antara lain disebabkan kenaikan harga pakan pabrikan, musim kemarau, harga ikan yang tidak stabil, serta minimnya modal petani ikan.

Tabel 2.43
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
Produksi perikanan (ton)	21.232,95	21.464,16	23.183,6	22.129,7

Sumber : Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Metro

d. Industri

Jumlah industri kreatif di Kota Metro dalam 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan yang positif, bahkan pada tahun 2014, kenaikannya mencapai lebih dari 100%. Hal ini berbanding lurus dengan omzet yang dihasilkan dari industri kreatif, yang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada akhirnya, industri kreatif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlahn pengangguran. Data perkembangan indikator perindustrian tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Realisasi Capaian Kinerja Program
Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
a. Rata-rata Omset Industri Kreatif (Rp.)	3.504.000.000	3.717.000.000	4.131.600.000	9.214.000.000
b. Jumlah Industri Kreatif (unit)	292	295	313	668

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*). Pada KBE, kekuatan

bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem ini diharapkan akan mampu membangkitkan kreatifitas dan inovasi yang diperlukan, agar produk-produk Kota Metro dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara lain, baik di pasar domestik maupun internasional. SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar (G) institusi pemerintah, pemerintah daerah, (A) lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan lembaga penunjang inovasi, (B) dunia usaha dan (S) masyarakat di daerah. Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut :

1. Tekanan persaingan global yang terus meningkat;
2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan
3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

Peningkatan daya ungkit (*leverage*) peran iptek yang sesuai dan spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan iptek (dalam arti luas) dan hasil litbangyasa serta mengembangkannya. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita nomor 6 meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan Nomor 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik salah satunya dengan cara mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) termasuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Bila dirinci menurut jenis pengeluaran makanan dan non makanan, dapat dilihat pergeseran pola konsumsi secara agregat terlihat bahwa masyarakat Kota Metro mulai lebih banyak pengeluaran untuk non makanan. Walaupun pada tahun 2012 pengeluaran untuk makanan masih lebih banyak dibandingkan untuk non makanan, tetapi pada tahun-tahun berikutnya pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari lima puluh persen dibandingkan total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan.

Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2012-2014 rata-rata sebesar 52,55%. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita
Kota Metro Tahun 2012 - 2014

INDIKATOR	TAHUN		
	2012	2013	2014
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita (%)	47,71	56,91	53,02
2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan Perkapita (%)	51,95	42,88	46,77

Sumber : BPS Kota Metro, 2015

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kota Metro. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

1. Perhubungan

Pertumbuhan jumlah orang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Jumlah orang yang melalui terminal tahun 2012- 2014 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.46
Jumlah Orang Pengguna Terminal Kota Metro
Tahun 2010-2014

INDIKATOR	TAHUN		
	2012	2013	2014
Jumlah Orang Melalui Terminal Per Tahun	292.154	209.803	276.214

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo, 2015

2. Sarana Perekonomian

Jumlah restoran/rumah makan/tendanisasi di Kota Metro dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2013 jumlah restoran sebanyak 124 buah, meningkat sebesar 16,13% pada tahun 2014. Jumlah hotel di Kota Metro dari tahun 2012 hingga 2014 tetap, yaitu sebanyak 10 hotel. Persentase jumlah restoran dan hotel tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.47
Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis di Kota Metro
Tahun 2010-2014

INDIKATOR	TAHUN		
	2012	2013	2014
1. Jumlah Restoran/Rumah Makan/Tendanisasi	110	124	144
2. Jumlah Hotel/Penginapan	10	10	10

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro, 2015

3. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Metro. Data rasio elektrifikasi berdasarkan data BPS Kota Metro, per Desember 2014 sebesar 100%.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kota Metro.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 di Kota Metro tercatat turunnya angka kriminalitas, hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kota Metro, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kota Metro.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Metro, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.48
Indikator Iklim Investasi Kota Metro Tahun 2012-2014

INDIKATOR	TAHUN		
	2012	2013	2014
1. Angka Kriminalitas	400	291	225
2. Jumlah Demo (kali)	6	11	7
3. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah	28	28	28
4. Lamanya Perijinan	6	5	5

Sumber : berbagai sumber dari SKPD Kota Metro

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya

kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial.

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kota Metro tahun 2013 mencapai angka 44, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 44 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas). Demikian juga di tahun 2014, total rasio ketergantungan masih berkisar pada angka 44 berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung 44 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.49
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Metro
Tahun 2012-2014

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)		
	0-14 tahun	15-64 tahun	>65 tahun	Anak	Lansia	Total
2012	40.196	104.776	4.389	38	4	43
2013	39.974	106.643	6.900	37	6	44
2014	40.368	108.545	7.079	37	6	44

Sumber : BPS Kota Metro, 2015

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Capaian RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan

dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program dan kegiatan yang mencakup input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2014. Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan Realisasi RPJMD memberikan gambaran tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menurut urusan dan bidang urusan pemerintah daerah, program, kegiatan dan realisasi target kinerja sampai dengan tahun 2013 yang di awal tahun telah dilaksanakan Penetapan Kinerja untuk masing-masing urusan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Evaluasi Kinerja RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Metro sampai dengan Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut. Khusus untuk capaian RPJMD tercantum pada Lampiran.

2.2.1 Urusan Wajib

Urusan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang sangat mendasar, yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bagi warga negara. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

A. Pendidikan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan pendidikan ini selama Tahun 2014 berjumlah 10 (sepuluh) Program, dengan total target Anggaran pada RKPD sebesar Rp 24.754.449.960,-dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 23.047.120.292,- atau 93,10% dari target Anggaran. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.50
Target Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2014

NO	PENDIDIKAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	811.980.630	906.159.951	762.385.389	93,89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.402.000	273.994.650	273.570.150	173,80
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	20.000.000	3.500.000	17,50
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.598.200	10.917.000	10.455.000	39,31
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	826.705.600	815.575.600	811.140.700	98,12
6	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	9.358.053.430	11.796.990.825	10.113.856.846	108,08
7	Program Pendidikan Menengah	11.127.895.000	9.882.904.050	7.726.904.146	69,44
8	Program Pendidikan Non Formal	272.635.000	265.406.900	218.556.900	80,16
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	966.133.500	419.852.775	361.387.825	37,41
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.187.046.600	3.169.479.810	2.765.363.336	232,96
	TOTAL	24.754.449.960	27.561.281.561	23.047.120.292	93,10

2. Capaian Kinerja Program

Dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib pendidikan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.51
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Semua Tenaga Pendidik minimal Ber-kualifikasi Pendidikan S1 dan Berserti-fikat Pendidikan untuk tingkat: - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	% % %	69,27 86,25 93,21
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,15
3. - APK PAUD - APK SD/MI - APK SMP/MTs - APK SMA /MA/SMK/Paket C	% % % %	104,39 90,88 121,20
4. - APM SD/MI - APM SMP/MTs - APM SMA/MA/SMK/Paket C	% % %	97,36 88,95 118,12
5. Rasio Koleksi Buku Teks di Perpustakaan Sekolah terhadap Jumlah Siswa	rasio	1:18
6. Rasio Ketersediaan Sekolah: - Pendidikan Dasar - Pendidikan Menengah	rasio	69,00 61,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program untuk Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2014 secara keseluruhan relatif mengalami kenaikan untuk masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015. Walaupun ada beberapa capaian kinerja yang turun realisasinya pada tahun 2014 antara lain Angka rata-rata lama sekolah, APK

SD/MI dan APK SMP/MTs, APM SD/MI dan Rasio Koleksi Buku Teks di Perpustakaan Sekolah terhadap Jumlah Siswa.

B. Kesehatan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan kesehatan ini selama Tahun 2014 berjumlah 22 (dua puluh dua) Program, dengan total target anggaran pada RKPD Tahun 2014 sebesar Rp 48.701.587.124,00 dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 76.154.081.433,00 atau 156,37% dari target. Kinerja anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.52

Target Realisasi belanja Langsung Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2014

NO	KESEHATAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.272.629.500	1.590.849.871	1.425.989.952	8,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	758.043.800	878.031.270	872.708.295	115,13
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.480.000	24.200.000	24.118.900	15,03
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	104.031.500	52.684.900	49.376.550	47,46
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.276.000.000	1.820.691.000	1.718.003.652	75,48
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.989.008.619	3.930.902.100	3.751.168.599	94,04
7	Program Pengawasan Obat & Makanan	72.775.000	85.958.750	76.020.850	104,46
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	638.480.456	592.734.000	586.419.900	91,85
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	177.000.000	128.002.000	119.371.000	67,44
10	Program Lingkungan Sehat	195.315.500	106.530.900	99.885.500	51,14

11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	450.991.500	342.143.276	319.942.326	70,94
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	391.576.000	143.500.000	130.431.000	33,31
13	Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras Puskesmas Pustu dan Jaringannya	2.391.600.000	2.406.809.470	2.398.051.870	100,27
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	108.131.000	56.473.400	50.396.400	46,61
15	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	60.000.000	256.174.750	254.039.450	423,40
16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	112.500.000	115.701.950	107.428.150	95,49
17	Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	86.763.000	127.151.150	113.946.250	131,33
18	Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan	1.462.393.999	4.878.210.500	3.770.999.466	257,86
19	Program perencanaan pembangunan bidang kesehatan	33.500.000	-	-	0,00
20	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Pras. Rumah Sakit /RS Jiwa / RS Paru-paru/RS Mata	17.128.191.300	2.514.732.500	1.680.549.810	9,81
21	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rs/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	832.175.950	-	-	0,00
22	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	-	61.941.383.240	58.605.233.513	0,00
TOTAL		48.701.587.124	81.992.865.027	76.154.081.433	156,37

2. Capaian Kinerja Program

Dari program-program yang dilaksanakan dalam urusan wajib kesehatan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.53
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	angka	0,9
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka	4,9
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka	0,3
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	angka	60,73
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	%	100
Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	%	100
Angka Usia Harapan Hidup	angka	72.98
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,00

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa yang menjadi Permasalahan dan solusi/tindak lanjut pada Dinas Kesehatan Kota Metro adalah:

I. Bidang Pelayanan kesehatan

Cakupan program dan beberapa program cakupan yang belum terpenuhi, antara lain:

1. Kunjungan Rawat Inap

Puskesmas SS Bantul dan Banjarsari sudah memenuhi target SPM 1,5% tapi masih ada permasalahan yaitu tenaga kesehatan untuk rawat inap masih kurang.

2. Kesehatan Gigi dan Mulut

Permasalahan :

- Promkes gigi belum maksimal
- Beberapa alat gigi rusak dan belum maksimal
- Beberapa puskesmas belum memiliki dokter gigi (Puskesmas Karangrejo, Puskesmas Yosodadi, Puskesmas Tejoagung)

3. Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)

Puskesmas di Kota Metro belum semua optimal melaksanakan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Permasalahan :

- Tenaga perawat di puskesmas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program perkesmas belum semua optimal melaksanakan dan masih ada puskesmas yang tidak memiliki tenaga perawat untuk perkesmas adalah Puskesmas SS Bantul dikarenakan pindah tempat kerja dan belum ada yang menggantikan untuk mengelola program perkesmas.
- Belum terjalin kerjasama yang baik antar lintas program di Puskesmas.

4. Laboratorium

Semua Puskesmas sudah melaksanakan pemeriksaan laboratorium dasar tetapi belum melakukan pemeriksaan laboratorium secara optimal, sehingga kunjungan/pemeriksaan laboratorium belum tercapai sesuai target.

Permasalahan :

- Belum ada refreshing ilmu bagi tenaga kesehatan laboratorium puskesmas
- Beberapa alat laboratorium rusak dan tidak dapat berfungsi
- Ada alat laboratorium tetapi reagenya belum ada.

5. Puskesmas Perkotaan

Program puskesmas yang masih terbatas sehingga dibentuknya beberapa puskesmas menjadi puskesmas percontohan

6. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus

Laporan Rumah Sakit belum terevaluasi dengan baik.

Permasalahan :

- Belum semua rumah sakit tertib membuat dan mengumpulkan laporan
- Keterbatasan pengetahuan SDM di Dinas Kesehatan, sehingga perlu konsultasi dan refreshing ilmu tentang manajemen rumah sakit.

7. Manajemen Puskesmas

Permasalahan :

- Hasil monitoring ke puskesmas, manajemen puskesmas belum terlaksana secara optimal
- Dalam mendiagnosa penyakit belum menggunakan ICD IX
- Sistem informasi kesehatan melalui e puskesmas belum berjalan semuanya.

Solusi akan permasalahan yang disebutkan diatas adalah :

1. Perlu adanya pembinaan yang lebih optimal ke puskesmas secara terpadu khususnya oleh bidang pelayanan kesehatan
2. Pimpinan perlu menyatukan dan menyamakan visi misi di bidang pelayanan kesehatan sehingga mutu saryankes di Kota Metro lebih baik
3. Perlu adanya kerjasama lintas bidang :
 - Bidang perencanaan Dalam menuju perencanaan manajemen puskesmas
 - Bidang SDK Dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan
4. Perlu adanya inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima di puskesmas antara lain dengan membuat puskesmas percontohan sebagai puskesmas terakreditasi.
5. Adanya *reward* dan *punishment* untuk tenaga kesehatan di puskesmas dan jejaringnya
6. Perlu konsultasi dan refreshing ilmu untuk rumah sakit
7. Perlu penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan latar belakang.

II. Bidang Sumber Daya Manusia & Pemberdayaan Masyarakat

1. Program Promosi kesehatan

Hambatan dan masalah dalam melaksanakan kegiatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Metro, sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Adanya beban kerja yang cukup banyak yang dialami oleh beberapa Pengelola Promkes Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan, karena mereka sering diserahi tanggung jawab beberapa pekerjaan ataupun Program lainnya, Sehingga sering tidak fokus dan Maksimal dalam mengerjakan Program Promosi Kesehatan .

- Sarana dan Prasarana

Sarana yang dirasakan adalah peralatan olah data dan pembuatan Media, yaitu PC, Komputer dan Laptop yang sangat kurang. Peralatan yang ada sudah tua serta dalam kondisi rusak dan sulit untuk dioperasikan.

Adapun Program Prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Semua Tatanan

Bentuk Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan untuk menunjang tercapainya program ini yaitu :

- Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Perubahan Perilaku (PHBS)
- Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat

B. Pembinaan dan Pemberdayaan UKBM

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan guna meningkatkan dan mencapai target program ini adalah :

- Revitalisasi Posyandu : Pemberian Insentif / Reward Kader dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

- Pemberdayaan UKBM : Pembinaan pada Poskestren, SBH dan UKBM lainnya
- Pembinaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
- C. Peningkatan Promosi Kesehatan di berbagai Media
Upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program ini adalah Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik : Televisi, Radio dan Media Cetak
- D. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Desa Siaga Aktif
Upaya yang akan dilaksanakan adalah :
 - Pembinaan di masyarakat secara umum, juga pada pengurus Poskeskel serta Forum Kesehatan Kelurahan.
 - Penilaian Pelaksana terbaik Desa/Kelurahan Siaga, dengan tujuan untuk menggali kreatifitas dan keaktifan pada masing-masing kelurahan
 - Monitoring dan Evaluasi secara berkala keberhasilan Kelurahan Siaga Aktif dan Poskeskel.
- 2. Program SDK
 - Belum terpenuhinya pelatihan untuk penunjang dalam bekerja bagi tenaga kesehatan
- 3. Program pembiayaan dan Jaminan kesehatan
 - Belum mencukupinya dana untuk pelaksanaan BPJS melalui PBI
 - Cakupan pemeliharaan Kesehatan BPJS yang masih rendah

III. Bidang P2PL

- Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan program P2 ISPA :
 - a. Cakupan penemuan Pnemonia masih jauh dibawah target (< 10% dari jumlah balita).
 - b Rendahnya kerjasama Lintas Program dalam pelaksanaan program P2 ISPA.
 - c. Nakes yang telah dilatih MTBS tidak melakukan Desinfo kepada petugas lain di puskesmas dalam

rangka penjangkaran kasus ISPA Pnemonia di puskesmas.

- Rencana tindak Lanjut :
 - a. Melanjutkan kegiatan Puskesmas Sentinel untuk program P2 ISPA di Puskesmas Metro
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Program dalam pelaksanaan program P2 ISPA di puskesmas.
- Kendala dalam pelaksanaan Program P2 HIV/AIDS :
 - a. Kota Metro belum menyusun Rencana Strategis penanggulangan HIV/AIDS
 - b. Kota Metro belum mengalokasikan untuk kegiatan survey HIV/AIDS.
 - c. Peran serta masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya desiminasi informasi tentang program P2 IMS dan HIV/AIDS kepada masyarakat.
 - d. Kurangnya kerjasama Lintas program dan Lintas sektoral dalam pelaksanaan program P2 IMS dan HIV/AIDS.
 - e. Belum tersedianya klinik CST untuk menangani pengobatan di Kota Metro
- Rencana Tindak Lanjut :
 - a. Kerjasama dengan KPA Kota Metro dalam melaksanakan program P2 HIV/AIDS di Kota Metro.
 - b. Sosialisasi dan Advokasi kepada Pemda Kota Metro tentang pentingnya Renstra dan dukungan politis serta dana dalam kegiatan program P2 IMS dan HIV / AIDS.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan program P2 IMS dan HIV / AIDS.
 - d. Melibatkan LSM peduli AIDS dalam rangka pelaksanaan program P2 HIV/AIDS di Kota Metro.
 - e. Membentuk Klinik VCT di Kota Metro.

- Kendala dalam pelaksanaan program P2 DBD
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam manajerial program maupun penatalaksanaan kasus DBD (di puskesmas maupun Rumah sakit).
 - b. Kegiatan PSN DBD melalui kegiatan 3M Plus belum membudaya pada masyarakat di Kota Metro.
 - c. Kinerja dari Tim Pokjanal/Pokja DBD di semua tingkat pemerintahan belum maksimal
 - d. Kurangnya kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan program P2 DBD.
 - e. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan kegiatan 3M plus secara rutin dan berkesinambungan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
- Rencana Tindak lanjut :
 - a. Meningkatkan kualitas Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) penyakit DBD.
 - b. *Advocacy* kepada Pemda Kota Metro dalam rangka dukungan politis dalam pelaksanaan prgram P2DBD di Kota Metro.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral dalam kegiatan program P2 DBD.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Program yang selama ini sudah terjalin dengan baik yaitu dengan Penyehatan Lingkungan dan Surveilans.

IV. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi

1. Program Gizi

Permasalahan :

- Masih rendahnya cakupan bayi usia 0 – 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif.
- Cakupan balita yang naik berat badannya belum mencapai target yang ditetapkan.

Solusi :

- Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ASI EKSKLUSIF dan dukungan pihak keluarga.
- perlunya ada kesiapan Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan tatalaksana gizi buruk.
- Pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas harus lebih baik.
- Perlunya Pelatihan Tim Tatalaksana Gizi Buruk di Puskesmas terutama Puskesmas Rawat Inap.

2. Program KIA

Permasalahan : Masih adanya kematian bayi dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

- Kurangnya tersedianya alat untuk penanganan sementara bayi baru lahir dengan asfiksia dan BBLR.
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil.
- Kurangnya dana untuk PMT terhadap bumil KEK
- Sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik
- Sarana dan prasarana ditingkat rujukan kurang memadai
- Pengkajian AMP yang belum berjalan dengan optimal
- Kurangnya pengetahuan Tenaga Kesehatan dalam mendeteksi dini pada neonatal resiko tinggi.
- Kurangnya kepedulian pengetahuan masyarakat terhadap bayi-bayi yang bermasalah dengan kesehatannya
- Kurangnya dana untuk pemantauan neonatal resiko tinggi

Solusi :

- Koordinasi dengan program gizi dalam rangka meningkatkan asupan gizi bumil KEK dengan sosialisasi gizi seimbang bagi bumil dan pemberian PMT
- Mengadakan pelatihan (BBLR, ASfiksia) bagi tenaga kesehatan untuk menambah pengetahuan.
- Menyediakan dan melengkapi alat untuk penanganan Asfiksia (sungkup) dan BBLR (baju kanguru).
- Bekerjasama dengan program promkes dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Konsep Kelurahan Siaga, termasuk suami siaga.
- Koordinasi Lintas program
- Pembentukan jejaring rujukan
- Pengkajian AMP pada setiap kasus kematian perinatal sampai dengan mengeluarkan rekomendasi Deteksi dini dan Penanganan Neonatal Resiko Tinggi
- Peningkatan pengetahuan dan wawasan tenaga kesehatan di puskesmas dalam mendeteksi dini neonatal resiko tinggi melalui pertemuan dan seminar yang diadakan pemerintah maupun swasta
- Bekerjasama dengan promkes dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai bayi yang mengalami permasalahan kesehatan
- Memaksimalkan penggunaan dana BOK dalam pemantauan Neonatal Resiko tinggi

3. Program Kesehatan Ibu

Permasalahan :

- a. Deteksi ibu hamil resti dan bumil resti yang ditangani masih belum tercapai karena :
 - Adanya bumil yang melakukan pemeriksaan kehamilan (K I dan K IV) luar wilayah Kota Metro,

sedangkan pertolongan persalinan dilakukan di Kota Metro sehingga riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu tidak dapat dideteksi.

- Adanya bumil resti yang tidak terpantau oleh tenaga kesehatan puskesmas karena kurangnya kegiatan untuk melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil
- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil resiko tinggi

b. Kasus Kematian Ibu akibat perdarahan karena :

- Status kesehatan ibu kurang baik
- Pengetahuan dan dukungan masyarakat kurang
- Terlambat mendapatkan pelayanan di tempat rujukan
- Belum maksimalnya pelayanan untuk Puskesmas Poned dan RS mampu Ponek
- Cakupan lintas program (seperti TT 1, TT2 Fe 1 dan Fe 3) yang masih rendah disebabkan karena belum berjalannya ANC terpadu dengan optimal

Solusi :

a. Agar deteksi bumil resti dan bumil resti tertangani bisa tercapai maka :

- Sistem pencatatan yang perlu diperbaiki bagi tenaga kesehatan
- Penjaringan bumil resti melalui P4K
- Sosialisasi ibu dan anak (KIA) khususnya ANC.
- Peningkatan keterampilan petugas

b. Upaya untuk menurunkan kasus kematian :

- Mengoptimalkan pelayanan puskesmas mampu Poned
- RSU mampu Ponek
- Meningkatkan mutu pelayanan dan sistem rujukan

- AMP di maksimalkan
- Pelaksanaan P4K lebih dioptimalkan
- Kelurahan siaga aktif

4. Program Pelayanan KB

Permasalahan :

- Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum baik
- Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor khususnya BKKB-PP baik dari pemberi pelayanan KB yang bersifat teknis medis maupun manajemen
- Masih banyaknya Nakes (dokter dan bidan) yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan seperti IUD, Implant, MOP dan MOW

Solusi :

- Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan melalui Bimtek pada pengelola program KB puskesmas.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan BKKB-PP.
- Meningkatkan keterampilan Nakes melalui pelatihan-pelatihan.

5. Kesehatan Remaja

- Penjaringan kesehatan siswa baru
Untuk cakupan pelaksanaan penjaringan siswa baru sudah mencapai target yaitu sebesar 100%.
- Program kesehatan remaja
 1. Belum semua SDM petugas pengelola program pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas terlatih PKPR.
 2. Sarana untuk pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas khususnya ruang konsling, belum semua Puskesmas menyediakan.
 3. Kurangnya sosialisasi Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja).

4. Belum maksimalnya Puskesmas melaksanakan pembinaan ke Sekolah.

Sedangkan Permasalahan dan Solusi yang telah diambil pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro antara lain :

- Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal pelayanan administrasi perkantoran yaitu banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran diharapkan adanya rekrutmen untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun tersebut.
- Permasalahan lain adalah dalam hal peningkatan sarana dan prasarana ruang rawat inap RS yaitu tidak semua barang alkes dalam proses pengadaan melalui e-Katalog tersedia. Disamping itu, kondisi yang memerlukan perbaikan dan untuk melengkapi sarana tidak bergerak lainnya yaitu peralatan kedokteran dan kesehatan yang belum mencukupi, sehingga timbul kesenjangan antara SDM, pelayanan, sarana dan prasarana yang ada saat ini dengan yang seharusnya.

Akibat kondisi di atas, timbul permasalahan-permasalahan:

1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM di rumah sakit.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana di RSUD A. Yani.
3. Belum maksimalnya mutu pelayan di rumah sakit.
4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang diunggulkan di rumah sakit.
5. Belum adanya inovasi, pelayanan unggulan di rumah sakit.
6. Pengembangan pendidikan yang belum optimal.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di Bidang Kesehatan salah satunya adalah pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjutan melalui rumah sakit dengan memberikan pelayanan kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan serta masyarakat di wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Hal tersebut menuntut agar RSUD A. Yani lebih meningkatkan pelayanan agar lebih baik dan memiliki produk layanan unggulan, sehingga pelayanan semakin meningkat serta memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan.

Berbagai kondisi yang terjadi seperti tertera pada sub permasalahan di atas menjadi tantangan sekaligus membuka peluang bagi RSUD A. Yani untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna, yang mencakup :

1. Pelayanan kesehatan prima, yaitu pelayanan yang lebih peka dalam mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan/pasien.
2. Pelayanan aman, yaitu pelayanan yang meminimalkan 5-D (Death=kematian, Deases=penyakit, Disability=ketidakmampuan, Discomfort=ketidaknyamanan, Dissatisfaction=infeksi penyakit) dan aman bagi petugas (kesehatan dan keselamatan kerja/K3RS).
3. Pelayanan yang inovatif, yaitu pelayanan yang dapat dipahami oleh pelanggan.
4. Pelayanan yang efektif, yaitu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Pedoman Diagnosis untuk Terapi (PDT).
5. Pelayanan yang efisien, yaitu pelayanan yang sesuai dengan SOP/protap.

6. Pelayanan Manusiawi, yaitu pelayanan yang memenuhi kebutuhan pasien bagi manusia seutuhnya, dimana pelanggan diperlakukan dengan sopan, santun, ramah, kasih sayang, dan penuh perhatian (sorakasaop).
7. Memperhatikan aspek sosial, yaitu bahwa pelayanan diberikan dengan tidak membedakan tingkat sosial, dan ekonomi.
8. Menyelenggarakan produk pelayanan unggulan dengan menciptakan produk pelayanan yang spesifik, berbeda, dan belum dimiliki oleh rumah sakit lain di Kota Metro.
9. Meningkatkan kualitas SDM medis dan non medis yang profesional dan berakhlak mulia yang pengertian.
10. Meningkatkan sistem manajemen keuangan, informasi, promosi serta sistem pemasaran menuju BLUD yang mandiri.

C. Pekerjaan Umum

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum ini Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas) Program, dengan total target Belanja Langsung Tahun 2014 sebesar Rp 107.684.546.372,- dengan Realisasi sebesar Rp 79.688.267.190,- atau 74,00% dari target Anggaran RKPD. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.54
Target Realisasi Anggaran
Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kota Metro Tahun 2014

NO	PEKERJAAN UMUM	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAI AN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.825.011.380	2.125.690.600	1.984.585.980	108,74
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.971.891.925	7.136.319.705	6.658.448.499	60,69
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.000.000	-	-	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000.000	50.000.000	49.921.200	99,84
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.515.000	41.670.000	34.387.200	80,88
6	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	62.149.667.500	46.098.414.404	43.512.096.650	70,01
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.035.065.927	7.948.513.450	7.561.723.650	75,35
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	30.865.890	30.865.890	29.605.890	95,92
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	5.476.225.000	3.043.225.000	2.893.235.250	52,83
8	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	5.349.043.750	1.315.068.750	1.250.610.550	23,38
11	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan lainnya	1.869.010.000	872.225.000	865.513.000	46,31
12	Program Peningkatan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3.225.000.000	1.426.332.710	1.357.226.150	42,08
13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.474.500.000	1.640.747.500	1.617.533.650	109,70
14	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	4.110.750.000	11.864.064.600	10.909.043.471	265,38
15	Program Perencanaan Teknis dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000.000	977.326.582	964.336.050	96,43
	TOTAL	107.684.546.372	84.570.464.191	79.688.267.190	74,00

2. Capaian Kinerja Program

Dari 15 (lima belas) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib Pekerjaan Umum tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.55
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	261,81
2. Jembatan dalam kondisi baik	unit	55
3. Drainase dalam kondisi baik	km	505
4. Turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	%	63,93
5. Rasio jaringan irigasi	rasio	36,20
6. Cakupan pelayanan air bersih	SR	3.438

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Total anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro masih kurang mencukupi sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya dapat terlaksana sampai akhir Tahun Anggaran 2014.
- b. Kurangnya sumber daya manusia di bidang teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Solusi :

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai pagu anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro untuk Tahun Anggaran yang akan datang.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kurangnya jumlah PNS di bidang teknis berdasarkan analisis dan beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro akan mengirimkan aparaturnya guna mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

D. Perumahan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan Perumahan ini Tahun 2014 berjumlah 4 (empat) Program, dengan total target Anggaran RKPD Tahun 2014 sebesar Rp 52.091.300.770,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 6.232.355.110,- atau 11,96% dari target anggaran RKPD. Kinerja anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.56
Target Realisasi Anggaran Urusan Perumahan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro Tahun 2014

NO	PERUMAHAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	49.575.800.770	2.918.443.050	2.775.768.600	5,60
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.443.750.000	2.850.000.000	2.703.495.110	187,26
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-	754.023.400	753.091.400	0,00
4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1.071.750.000	-	-	0,00
	TOTAL	52.091.300.770	6.522.466.450	6.232.355.110	11,96

2. Capaian Kinerja Program

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib Perumahan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.57
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Rasio Rumah layak huni	rasio	68,30

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Total anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro masih kurang mencukupi sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya dapat terlaksana sampai akhir Tahun Anggaran 2014.
2. Kurangnya sumber daya manusia di bidang teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Solusi :

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai pagu anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro untuk Tahun Anggaran yang akan datang.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kurangnya jumlah PNS di bidang teknis berdasarkan analisis dan beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro akan mengirimkan aparaturnya guna mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

E. Penataan Ruang

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Selaras dengan Tugas pokok dan fungsi bidang tata ruang, program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan antara lain, pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan fisik kota, memberikan rekomendasi terhadap warga/masyarakat/investor yang akan mendirikan bangunan, serta mengembangkan infrastruktur kota yang dibutuhkan oleh warga/masyarakat dan sebagainya yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam masing-masing seksi yaitu : Seksi Pengendalian Tata Ruang, Seksi Pengendalian tata bangunan dan Seksi Pengembangan infrastruktur Kota.

Untuk menunjang Tupoksi Seksi pengembangan infrastruktur kota dan Tupoksi Seksi pengendalian tata ruang, serta Tupoksi Pengendalian Tata Bangunan pada tahun 2014 telah diadakan program kegiatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58

**Target Realisasi Anggaran Urusan Penataan Ruang
pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2014**

NO	PENATAAN RUANG	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.841.859.515	6.371.112.500	6.120.265.811	104,77
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.116.700.000	1.152.420.000	1.034.791.592	92,67
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	15.000.000	-	0,00
4	Program Perencanaan Tata Ruang	175.000.000	64.850.000	34.813.500	19,89
5	Program Pemanfaatan Ruang	100.000.000	149.200.000	142.770.850	142,77
6	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	160.000.000	125.000.000	109.642.050	68,53
	TOTAL	7.408.559.515	7.877.582.500	7.442.283.803	100,46

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pelaksanaan kegiatan pemasangan lampu LED belum terlaksana dikarenakan ada perubahan (muncul harga *e-catalog*) sehubungan dengan rencana sebelumnya yang bukan *e-catalog* sehingga proses pelaksanaan harus diulang dari awal.
2. Tidak cukupnya waktu pelaksanaan karena pengadaan harus melalui pesanan oleh penyedia (*e-katalog*) terpilih minimal 60 hari kerja.

Solusi :

Pelaksanaan ditunda pada tahun 2015 dengan jumlah yang sama ditambah dengan kegiatan baru murni tahun 2015.

F. Perencanaan Pembangunan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan ini selama Tahun 2014 berjumlah 13 (tiga belas) Program, dengan total target Anggaran selama Tahun 2014 sebesar Rp. 7.408.559.515,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 7.442.283.803,- atau 100,46% dari target anggaran. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.59

**Target Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Metro Tahun 2014**

NO	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAI AN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	884.093.100	1.006.607.100	954.898.274	108,01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	448.464.000	452.250.000	222.740.000	49,67
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.800.000	-	0	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	50.000.000	40.275.000	53,70
5	Program Peningk.Pengemb.Sistem Pelap. Capaian Kinerja& Keu.	35.000.000	85.000.000	84.295.000	240,84
6	Program Pengembangan Data/ Informasi	2.110.000.000	1.012.000.000	986.617.150	46,76
7	Program Kerjasama Pembangunan	-	100.000.000	85.350.500	0,00
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar	200.000.000	245.000.000	123.243.725	61,62
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	180.000.000	185.200.000	174.647.200	97,03
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.285.000.000	1.298.040.000	1.267.010.600	98,60
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	310.000.000	255.000.000	245.316.000	79,13
12	Program Perencanaan Sosial Budaya	840.000.000	546.200.000	536.966.900	63,92
13	Program Perencanaan Tata Ruang	835.000.000	365.650.000	361.917.000	43,34
	TOTAL	7.408.559.515	7.877.582.500	7.442.283.803	100,46

2. Capaian Kinerja Program

Dari 13 (sebelas) program yang dilaksanakan dalam urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.60

Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	SIM	8
2. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	61
3. Persentase Aspirasi Masyarakat yang terharmonisasi dalam APBD	%	60
4. Dokumen Informasi Pembangunan	dokumen	30

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program untuk Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun. 2014 sudah sangat baik, untuk indikator sistem informasi manajemen pemerintah daerah sudah mencapai target sampai dengan tahun 2014. Sedangkan untuk pencapaian indikator penjabaran program RPJMD kedalam RKPD mengalami penurunan, hal ini terkendala oleh ketidakberhasilan fungsi asistensi kegiatan SKPD pada Bappeda. Fungsi asistensi lebih menekankan pada anggaran daripada program dan kegiatan. Selain itu, SDM perencana SKPD tidak mengacu pada RPJMD saat menyusun kegiatan tahunan. Solusi yang perlu diambil untuk kedepannya adalah penguatan fungsi perencanaan kegiatan SKPD oleh Bappeda.

Untuk indikator Persentase aspirasi masyarakat yang terharmonisasi dalam APBD telah mencapai angka 60% sehingga menghasilkan tingkat capaian 88,23% (target tahun 2014 adalah 68%) atau dalam kategori sangat baik. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian sasaran adalah meningkatnya intensitas pertemuan dengan masyarakat dalam pembahasan perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang, Bedah APBD, Rapat Koordinasi Pemerintah Kota dan Forum Konsultasi Publik untuk beberapa produk perencanaan. Selain itu, meningkatnya tingkat sensitivitas masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan juga menjadi *feedback* yang sangat baik bagi pemerintah.

Untuk indikator Dokumen Informasi Pembangunan, capaian kinerja pada tahun 2014 adalah 90,90% (target tahun 2014 adalah 33 dokumen). Beberapa faktor pendukung pencapaian target adalah meningkatnya jumlah dokumen informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak hanya diterbitkan oleh Bappeda saja, namun SKPD lain sesuai bidang tugasnya masing-masing. Selain itu, kesadaran SKPD untuk mempublikasikan informasi pembangunan melalui sistem on-line juga memudahkan masyarakat untuk memahami proses pelaksanaan pembangunan.

Kendala pencapaian target adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang teknologi informasi. Jika dilihat dari target akhir 2015, realisasi menunjukkan angka optimis dengan kondisi indikator yang bersifat rutin atau dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2015.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Terhadap rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Metro untuk Tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

- a. Tingkat koordinasi antar Bappeda dan SKPD masih dirasa sulit terutama dalam pengumpulan bahan dan informasi perencanaan serta evaluasi perencanaan seperti pengumpulan Renja-SKPD, Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD, RKA-SKPD, Informasi pembangunan kecamatan yang penyampaianya masih melewati batas waktu/target yang ditentukan.
- b. Masih kurangnya SDM baik pada lini staf maupun tingkat eselon di beberapa Bidang Bappeda, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang tersebut sering terhambat dan harus dilaksanakan oleh staf lain.
- c. Sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan antara tugas dan fungsi Bappeda dengan tugas-tugas lain yang diberikan atasan diluar yang menjadi tanggung jawab Bappeda.
- d. Masih kurang efektifnya pengadministrasian dan pemanfaatan sarana prasarana Bappeda dimana terjadi beberapa sarana dan prasarana yang seharusnya sudah tidak dapat dipergunakan tetapi karena belum ada penghapusan barang sehingga terjadi penumpukan barang di dalam gudang.

- e. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencanaan sehingga proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dioptimalkan.

Solusi :

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas adalah :

- a. Agar tingkat koordinasi antar Bappeda dan SKPD dapat terlaksana dengan baik terutama dalam pengumpulan bahan dan informasi perencanaan serta evaluasi perencanaan perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif, diantaranya dengan terus mengkatifkan Forum Perencana Kota Metro dan pemberian insentif terutama untuk unsur-unsur penyusun perencanaan pada setiap SKPD.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan SDM baik pada lini staf maupun tingkat eselon di beberapa Bidang Bappeda, telah dilakukan pengusulan untuk mengisi beberapa jabatan kosong serta permintaan penambahan unsur staf melalui BKD.
- c. Mengingat sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan antara tugas dan fungsi Bappeda dengan tugas-tugas lain yang diberikan atasan diluar yang menjadi tanggung jawab Bappeda, hendaknya dapat diberikan bentuk kompensasi oleh Pemerintah Kota Metro sehingga tugas pokok dan fungsi Bappeda dapat tetap berjalan dengan kondusif. Adapun beberapa kompensasi yang memungkinkan diberikan adalah melalui pos belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau melalui pos belanja tunjangan kesejahteraan.
- d. Agar sarana dan prasarana Bappeda dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien, supaya segera dilakukan pendataan sarana prasarana Bappeda beserta kondisinya serta segera dilakukan usulan untuk penghapusan sarana prasarana Bappeda yang sudah tidak memadai.

G. Perhubungan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan Perhubungan ini selama Tahun 2014 berjumlah 10 (sepuluh) Program, dengan total target Belanja Langsung selama Tahun 2014 sebesar Rp 2.213.699.000,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 2.969.342.366,- atau 134,13% dari target Belanja Langsung. Belanja Langsung tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.61
Target Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro
Tahun 2014

NO	PERHUBUNGAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAI AN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.549.000	794.549.010	759.512.866	105,55
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.150.000	443.115.000	441.475.350	84,07
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000	55.000.000	54.842.000	91,40
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	12.500.000	12.475.000	41,58
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	41.155.500	40.741.000	0,00
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	115.000.000	273.975.000	272.996.000	237,39
7	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	355.000.000	234.999.950	234.270.450	65,99
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	125.000.000	125.000.000	124.639.000	99,71
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	239.000.000	987.740.200	985.090.700	412,17
10	Program Pengumpulan/Analisa Data Base Lalu Lintas	45.000.000	45.000.000	43.300.000	96,22
	TOTAL	2.213.699.000	3.013.034.660	2.969.342.366	134,13

2. Capaian Kinerja Program

Dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib Perhubungan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.62
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Rasio Izin Trayek	%	36

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro untuk menangani urusan wajib Perhubungan selama tahun 2010-2014 tidak menemui permasalahan dan dapat dilaksanakan dengan baik.

H. Lingkungan Hidup

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Penekanan program di bidang lingkungan hidup yang bertumpu pada peningkatan kualitas lingkungan serta peran dunia pendidikan dan masyarakat dalam rangka menunjang program Pemerintah Kota Metro yaitu menjadi Kota Sehat/Adipura dan Adiwiyata.

Tahun 2014 urusan wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Pariwisata serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro.

Tabel 2.63
Target Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada
Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Kantor Lingkungan Hidup
Kota Metro Tahun 2014

NO	LINGKUNGAN HIDUP	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Administrasi Perkantoran	223.120.110	187.895.700	179.673.067	80,53
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.197.000	121.485.000	121.249.450	123,48
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.000.000	-	-	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.000.000	10.000.000	10.000.000	90,91
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,00
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	95.000.000	52.368.000	52.309.000	55,06
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.542.900.000	2.504.717.500	2.499.295.350	98,29
8	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	90.600.000	78.900.000	78.680.000	86,84
9	Program Peningkatan Kualitas Sumber dan Akses Informasi SDA & LH	111.500.000	141.116.000	138.662.300	124,36
10	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	130.400.000	50.220.000	49.525.700	37,98
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.760.000.000	2.296.755.000	2.025.968.000	53,88
12	Program Peningkatan Pelayanan Listrik Umum	2.592.522.000	1.952.520.830	665.903.050	25,69
13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	462.968.000	1.485.705.057	1.261.581.551	272,50
14	Program Peningkatan Pelayanan PJU & Penghijauan Kota	615.789.850	615.789.850	460.782.300	74,83
15	Program Pengembangan Hutan Kota Sebagai RTH yang bersifat Publik	517.518.500	-	-	0,00
TOTAL		11.273.515.460	9.508.472.937	7.554.629.768	67,01

2. Capaian Kinerja

a. Persentase Pencemaran Status Mutu Air

	2014
Target	25%
Realisasi Tahun	21%
Capaian Kinerja Tahunan	117,65
Capaian Kinerja s/d Tahun 2015	142,85

b. Jumlah pohon yang ditanam untuk konservasi

	2014
Target	6.049 batang
Realisasi Tahun	15.376 batang
Capaian Kinerja Tahunan	157
Capaian Kinerja s/d Tahun 2015	31,64

c. Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup

	2014
Target	40%
Realisasi Tahun	18%
Capaian Kinerja Tahunan	45
Capaian Kinerja s/d Tahun 2015	60

d. Persentase Penanganan Sampah

	2014
Target	94%
Realisasi Tahun	70%
Capaian Kinerja Tahunan	74,47
Capaian Kinerja s/d Tahun 2015	73,68

e. Penghargaan Adipura yang diterima

	2014
Target	1
Realisasi Tahun	0
Capaian Kinerja Tahunan	0
Capaian Kinerja s/d Tahun 2015	0

f. Jumlah kelurahan yang sudah menerapkan 3 R

	2014
Target	4 kelurahan
Realisasi Tahun	5 kelurahan
Capaian Kinerja Tahunan	125
Capaian Kinerja s/d Tahun 2015	22,72

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2014 yang terdiri atas 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yang dapat dikatakan mengalami kegagalan pencapaian targetnya yaitu kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. Sementara target kegiatan lainnya dapat direalisasikan dengan maksimal.

Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura dengan target diraihnya 1 (satu) penghargaan Adipura pada tahun 2014 tidak mampu diwujudkan. Pemerintah Kota Metro gagal meraih penghargaan adipura tahun karena nilai hasil verifikasi/penilaian untuk tahun 2013/2014 dibawah standar nilai yang ditentukan untuk kabupaten/kota mendapatkan penghargaan adipura.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dalam meraih penghargaan adipura adalah:

- a. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan asri;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan kebersihan lingkungan dan sampah;
- c. Kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan atau pengelolaan kebersihan sampah;
- d. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan/tercapainya kinerja yang akan datang diperlukan beberapa solusi, diantaranya:
- e. Adanya upaya peningkatan sarana SDM dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya dengan berbagai cara seperti penyuluhan, pengawasan dan pembinaan secara kontinyu kepada masyarakat dan aparat pemerintah;
- f. Adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan sampah;

- g. Adanya upaya untuk tetap mempertahankan piala adipura yang telah diraih pada tahun-tahun mendatang dengan cara tetap menjaga kebersihan.

Walaupun penghargaan adipura pada tahun 2013/2014 tidak diperoleh oleh Kota Metro namun pada kegiatan ini mempunyai fokus utama yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menciptakan Kota Metro yang sehat, hijau dan bersih, salah satunya melalui jumat bersih yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Pemerintahan Kota Metro dan masyarakat dengan tujuan untuk mendorong masyarakat untuk dapat merubah perilaku menjadi lebih mencintai kebersihan dan peduli terhadap lingkungan.

I. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil ini selama Tahun 2014 berjumlah 5 (lima) Program, dengan total target anggaran selama Tahun 2014 sebesar Rp. 1.235.012.250,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.280.627.521,- atau 103,69% dari target anggaran. Kinerja anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.64
Target Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
pada Disdukcapil Kota Metro Tahun 2014

NO	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	381.621.950	473.341.487	411.225.681	107,76
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173.290.200	334.662.500	330.346.040	190,63
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	5.000.000	4.995.000	0,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	16.992.000	16.908.000	0,00
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	680.100.100	536.490.000	517.152.800	76,04
	TOTAL	1.235.012.250	1.366.485.987	1.280.627.521	103,69

2. Capaian Kinerja Program

Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.65
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	SIM	8

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi persyaratan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.
- b. Keterlambatan laporan dari Kelurahan dan Kecamatan ke Disdukcapil.

- c. Masih adanya Sarana dan Prasarana yang Tidak layak Pakai .
- d. Adanya Peraturan-peraturan kependudukan dan Catatan Sipil yang baru didalam prosedur pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.
- e. Kurangnya Koordinasi antara petugas operator dan Verifikasi.

Solusi :

- 1. Mengadakan sosialisasi secara terus menerus mengenai peraturan-peraturan didalam prosedur pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.
- 2. Mengingatkan pada waktu rakor agar register kelurahan dan kecamatan menyampaikan laporan rutin tiap bulan maupun triwulan.
- 3. Mengusulkan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 4. Adanya koordinasi antara petugas pelayanan dengan masyarakat didalam prosedur pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.
- 5. Adanya Koordinasi antara petugas operator dan Verifikasi.

J. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini selama Tahun 2015 berjumlah 4 (empat) Program, dengan total target anggaran selama Tahun 2010-2015 sebesar Rp 765.000.000,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 519.736.600,- atau 67,94% dari target anggaran.

Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.66
Target Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro Tahun 2014

NO	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAI AN (%)
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	25.000.000	14.685.000	14.085.000	56,34
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	155.000.000	85.169.000	81.719.000	52,72
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	405.000.000	254.721.800	246.541.800	60,87
4	Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dlm Pembangunan	180.000.000	178.390.800	177.390.800	98,55
	TOTAL	765.000.000	532.966.600	519.736.600	67,94

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya data terpilah disemua sektor pembangunan untuk setiap tahunnya sebagai acuan pelaksana propinsi.
2. Kurang maksimalnya kegiatan gerakan sayang ibu, baik yang dilaksanakan di kecamatan maupun kelurahan.
3. Belum maksimalnya peranan institusi dalam melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan program KB/KS dan pemberdayaan perempuan.
4. Kurangnya dukungan dana guna meningkatkan kegiatan-kegiatan pada kelompok-kelompok kegiatan seperti UPKKS, BKB, BKL dan BKR.
5. Belum semua dinas/skpd yang melaksanakan perencanaan anggaran yang berperspektif gender.
6. Keterbatasan sarana pelayanan dalam hal alat kontrasepsi dan *side effect*.

7. Kurangnya tenaga yang profesional dalam hal pengolahan data keluarga.
8. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas-tugas pada kantor BKKB-PP Metro.

Berikut solusi yang dapat dilaksanakan :

1. Pembuatan data terpilah melalui data profil gender
2. Pembinaan yang lebih intensif pada kegiatan GSI/PSI dari tingkat kota ke kecamatan dan dari kecamatan ke kelurahan
3. Melakukan pembinaan dan orientasi yang lebih intensif kepada institusi dalam mensosialisasikan program KB.
4. Pemberian dukungan dana dalam hal kegiatan-kegiatan pada kelompok kegiatan (Poktan)
5. Penambahan dan pelatihan bagi tenaga yang lebih profesional dalam hal pengolahan data.
6. Penambahan sarana dan prasarana pada kantor BKKB-PP Kota Metro.

K. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro, dengan jumlah program yang direncanakan dalam RKPD 2014 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini selama Tahun 2014 berjumlah 11 (sebelas) Program, dengan total target anggaran selama Tahun 2014 sebesar Rp 3.853.810.000,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 2.359.890.799,- atau 61,24% dari target anggaran. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.67

Target Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro Tahun 2014

NO	PROGRAM	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.810.000	278.329.200	239.471.789	121,68
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.000.000	371.497.000	370.865.950	236,22
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	31.889.000	31.590.500	315,91
4	Program Keluarga Berencana	2.485.000.000	1.367.491.900	1.344.262.560	54,10
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000	17.751.000	16.839.000	30,62
6	Program Pelayanan Kontrasepsi	235.000.000	54.944.000	54.944.000	23,38
7	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	320.000.000	249.530.000	248.530.000	77,67
8	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan Kelompok Dimasyarakat	55.000.000	53.389.500	53.387.000	97,07
9	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	10.000.000	-	-	0,00
10	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	165.000.000	-	-	0,00
11	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Kemasyarakatan	165.000.000	-	-	0,00
	TOTAL	3.853.810.000	2.424.821.600	2.359.890.799	61,24

2. Capaian Kinerja Program

Dari 8 (delapan) program yang dilaksanakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil selama tahun 2010-2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.68

Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Persentase Peserta KB Aktif	%	99

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Keterbatasan sarana pelayanan dalam hal alat kontrasepsi dan *side effect*.
2. Kurangnya tenaga yang profesional dalam hal pengolahan data keluarga.

Solusi :

1. Melakukan pembinaan dan orientasi yang lebih intensif kepada institusi dalam mensosialisasikan program KB.
2. Menambah personil tenaga ahli bidang pengolahan data keluarga.

L. Sosial

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan wajib sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) program dari 8 program yang direncanakan dalam RKPD tahun 2014. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.69**Target Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014**

NO	SOSIAL	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	249.836.000	234.229.000	227.887.268	91,21
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.200.000	48.588.000	43.795.891	59,02
3	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	10.200.000	-	-	0,00
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya	350.212.000	618.367.050	609.601.140	174,07
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	50.000.000	203.426.000	198.726.000	397,45
6	Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	41.000.000	80.500.000	79.550.000	194,02
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	81.700.000	93.151.000	92.473.700	113,19
8	Program Penanaman & Pembinaan Nilai Kebangsaan	93.000.000	86.844.000	82.134.000	88,32
	TOTAL	950.148.000	1.365.105.050	1.334.167.999	140,42

2. Capaian Kinerja Program

Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib sosial selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program yaitu :

Tabel 2.70**Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Sosial Tahun 2014**

Indikator Kinerja	Satuan	2014
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	95,49

Dari tabel pencapaian kinerja secara signifikan mencapai target tahunan. Dukungan program dan kegiatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target kerja. Total anggaran yang dilaksanakan dalam penanganan masalah sosial dari Tahun 2014 sebesar Rp. 1.334.167.999,- atau 140,42% dari target anggaran yang

ditetapkan dalam RKPD 2014 yaitu Rp 950.148.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain bantuan perbaikan rumah (keluarga miskin), pengadaan sasaran dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, pendampingan program sosial berkelanjutan, monitoring evaluasi dan program rumah tidak layak huni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat/keluarga fakir miskin, dan pendampingan program keluarga harapan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Mengingat masih banyaknya Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PSKS yang belum tersentuh, dikarenakan terbatasnya alokasi dana APBD Kota Metro untuk penanganannya.

Solusi :

Pada waktu yang akan datang alokasi dana untuk bidang sosial dan ketenagakerjaan dapat ditingkatkan, agar tujuan dari program kegiatan dapat dicapai dengan maksimal.

M. Ketenagakerjaan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan wajib ketenaga kerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) program, yaitu :

Tabel 2.71
Target Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan pada
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014

NO	KETENAGAKERJAAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Kerja	605.790.000	837.645.000	798.089.700	131,74
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	150.000.000	175.027.000	117.729.200	78,49
3	Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	147.619.000	125.185.000	123.160.000	83,43
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	-	168.325.000	168.305.000	0,00
	TOTAL	903.409.000	1.306.182.000	1.207.283.900	133,64

2. Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja dari urusan wajib ketenagakerjaan selama tahun 2014 yaitu:

Tabel 2.72
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Tahun 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2014
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45
Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	42,4
Rasio Penduduk Bekerja	Rasio	0,96

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja urusan wajib ketenagakerjaan cukup baik dalam menjaga iklim tenaga kerja di Kota Metro. Kondisi ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah industri kreatif yang muncul tahun 2014 mampu menciptakan lapangan kerja di Kota Metro. Kendala utama yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah masih rendahnya tingkat komunikasi antara Pemerintah Daerah Kota Metro dengan pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan, terutama lowongan pekerjaan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Data pencari kerja dari tahun ketahun terus meningkat tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia dengan kata lain tingkat pengangguran masih tinggi di kota Metro. Untuk itu Pemerintah perlu kiranya melatih pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri (Wiraswasta). Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro telah melaksanakan pelatihan-pelatihan dimaksud walaupun belum sebanding dengan kebutuhan.

Solusi :

Pada waktu yang akan datang alokasi dana untuk bidang sosial dan ketenagakerjaan dapat ditingkatkan, agar tujuan dari program kegiatan dapat dicapai dengan maksimal.

N. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM ini selama Tahun 2014 berjumlah 7 (tujuh) Program, dengan total target Anggaran selama Tahun 2014 sebesar Rp 2.149.828.200,00 dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 1.638.434.897,00 atau 76,21% dari target anggaran. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.73
Target Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UMKM pada
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2014

NO	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAI AN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.723.200	321.664.400	311.030.121	111,19
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.638.000	125.893.000	125.893.000	105,23
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	1.600.000	1.575.000	15,75
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31.967.000	49.919.000	48.773.000	152,57
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	135.000.000	47.325.000	46.305.000	34,30
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	1.345.000.000	1.114.396.450	916.462.776	68,14
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	228.500.000	190.116.000	188.396.000	82,45
	TOTAL	2.149.828.200	1.850.913.850	1.638.434.897	76,21

2. Capaian Kinerja Program

Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib Koperasi dan UMKM selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.74
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Persentase Koperasi Aktif	%	66,5
5. Persentase Usaha Mikro Aktif	%	93
6. Persentase Usaha Kecil Aktif	%	100
7. Rata - rata Omset - Usaha Mikro	Rp/Tahun	293.328.000.000
8. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro	Unit	451

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program untuk Urusan Wajib Koperasi dan UMKM Tahun 2014 secara keseluruhan relatif mengalami kenaikan untuk masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurang sadarnya penerima PPM agar memngangsur dana PPM yang sudah diterima untuk digulirkan pada pelaku usaha lain melalui LKK setempat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pameran. Kurang menariknya kemasan dari produk-produk yang ditampilkan
3. Sulitnya mendapatkan informasi dari pelaku usaha tentang data-data usaha yang dimiliki.
4. Kurangnya pembinaan produk dan kemasan UKM. Kurangnya promosi dan pemasaran produk UMKM. Jadwal pelaksanaan pameran menyesuaikan jadwal pusat/propinsi.
5. Belum adanya legalitas kelembagaan LKK. Pengurus LKK kurang optimal dalam mengelola LKK.
6. Pihak penyelenggara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tidak siap menggelar pameran sehingga kegiatan pameran dibatalkan.
7. Banyaknya produk-produk hasil industri yang belum dilakukan pengujian dikarenakan mahalnya biaya pengujian.
8. Waktu pelaksanaan bimtek kemasan kurang, sehingga peserta tidak dapat melakukan praktek langsung pembuatan kemasan.

Solusi :

1. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap LKK
2. Memperbaiki dan mengajukan anggaran penyediaan sarana dan prasarana pameran.
3. Mencari sumber data tentang pelaku usaha dari berbagai pihak melalui perangkat kelurahan dan masyarakat sekitarnya.
4. Perlunya keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran TK Propinsi dan Nasional.
5. Perlu adanya fasilitas dari Dinas dalam menentukan legalitas kelembagaan. Perlunya dilakukan pembinaan kepada pengurus LKK Kota Metro.
6. Dilakukan analisis dan pertimbangan yang tepat dalam pemilihan even pameran yang diikuti.
7. Perlunya adanya anggaran yang memadai serta pembinaan kepada pelaku IKM.
8. Untuk pelaksanaan kegiatan bimtek kemasan selanjutnya, materi kegiatan tidak hanya terdiri dari teori, tetapi hendaknya ada praktek langsung.

O. Penanaman Modal

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan wajib penanaman modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) dengan jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) program, yaitu :

Tabel 2.75
Target Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal pada
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2014

NO	PENANAMAN MODAL	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.500.000	396.932.750	372.147.434	68,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.500.000	81.598.000	80.212.500	106,24
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	15.000.000	15.000.000	8.860.000	59,07
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.000.000	21.252.000	21.020.950	65,69
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	85.000.000	-	-	0,00
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	205.000.000	-	-	0,00
7	Program Pengelolaan Perizinan Terpadu	355.000.000	438.908.500	400.694.500	112,87
	TOTAL	1.310.000.000	953.691.250	882.935.384	67,40

2. Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja dari urusan wajib pemberdayaan masyarakat selama tahun 2014 yaitu :

Tabel 2.76
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Wajib Penanaman Modal
Tahun 2014

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
Rata-Rata Lama Proses Perijinan	Hari	5

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Peningkatan iklim usaha dan investasi di Kota Metro sangat ditentukan oleh peraturan dan perijinan yang pasti. Investor sangat mengharapkan kepastian peraturan dan lamanya pengurusan perijinan sehingga investor bisa menghitung semua biaya pengeluaran dengan pasti. Dibutuhkan sistem

perijinan yang lebih baik untuk memudahkan para investor untuk mengurus ijin. Untuk itu diperlukan perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak perijinan.

Solusi :

Pada Tahun Anggaran 2013, KPMPTSP telah melakukan pengadaan perangkat pendukung dalam bentuk pengadaan komputer dan perangkat lainnya untuk memudahkan mengurus ijin dan memudahkan investor memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.

P. Kebudayaan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro sejak tahun 2012 - 2014, sebelumnya Urusan wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Adapun jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan kebudayaan ini selama Tahun 2014 berjumlah 4 (empat) Program, dengan total target Anggaran selama Tahun 2014 sebesar Rp 2.127.129.000,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 1.675.886.450,- atau 78,79% dari target anggaran. Kinerja Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.77

Target Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2014

NO	KEBUDAYAAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	285.000.000	89.618.450	78.833.450	27,66
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	365.129.000	65.505.000	65.305.000	17,89
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.145.000.000	1.410.473.000	1.392.585.500	121,62
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	332.000.000	139.692.500	139.162.500	41,92
	TOTAL	2.127.129.000	1.705.288.950	1.675.886.450	78,79

2. Capaian Kinerja Program

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib kebudayaan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.78
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Jumlah event kesenian/kebudayaan	event	11
Jumlah penghargaan dan kerjasama bidang budaya, seni dan olahraga	Macam	31

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program untuk Urusan Wajib kebudayaan Tahun 2014 secara keseluruhan relatif mengalami kenaikan untuk masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015. Peningkatan Kinerja yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 dimana Indikator Jumlah Event Kesenian/Kebudayaan yang sebelumnya hanya mengadakan dan mengikuti 3 event, pada tahun 2014 telah mengadakan dan mengikuti 11 event, demikian juga dengan indikator jumlah penghargaan dan kerjasama bidang budaya dan seni juga mengalami kenaikan signifikan di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa iklim berkesenian dan kecintaan terhadap kebudayaan di lingkungan masyarakat Kota Metro sudah semakin tinggi.

Q. Kepemudaan dan Olahraga

1. Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro sejak tahun 2012 - 2015, sebelumnya urusan wajib kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Adapun jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga ini tahun 2014 berjumlah 6 (enam) program, dengan total target belanja langsung selama tahun 2014 sebesar Rp 1.826.142.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 1.042.572.150,- atau 57,09% dari target anggaran. Kinerja anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.79

Target Realisasi Anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014

NO	PEMUDA OLAHRAGA	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	180.190.000	146.465.500	61.150.000	33,94
2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	15.774.000	10.638.000	10.638.000	67,44
3	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	33.120.000	28.996.000	28.996.000	87,55
4	Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olah Raga	75.943.000	67.649.000	67.649.000	89,08
5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.021.115.000	1.085.557.750	874.139.150	85,61
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	500.000.000	250.000.000	-	0,00
	TOTAL	1.826.142.000	1.589.306.250	1.042.572.150	57,09

2. Capaian Kinerja Program

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib kebudayaan selama tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.80
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Jumlah penghargaan dan kerjasama bidang budaya, seni dan olahraga	macam	31

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program untuk Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 secara keseluruhan relatif mengalami kenaikan untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015. Peningkatan Kinerja yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 dimana indikator jumlah penghargaan dan kerjasama bidang olahraga juga mengalami kenaikan signifikan di tahun 2014.

R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Program Yang telah Dilaksanakan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Metro, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

Untuk Tahun 2014, jumlah program yang mendukung urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebanyak 21 (dua puluh satu) Program, dengan total target Belanja Langsung selama Tahun 2014 sebesar Rp. 5.979.228.550,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 5.527.509.669,- atau 92,45% dari target Belanja Langsung. Belanja Langsung tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.81**Target Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Metro Tahun 2014**

NO	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.670.572.350	2.772.335.500	2.207.030.719	82,64
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	526.129.000	668.733.000	585.862.100	111,35
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	219.455.000	423.894.000	417.183.000	190,10
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.015.000	58.045.000	53.573.600	81,15
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.000.000	51.000.000	13.175.000	20,59
6	Program Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	170.000.000	194.580.000	174.074.600	102,40
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,00
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	70.000.000	55.000.000	48.800.000	69,71
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	230.700.000	230.000.000	220.940.400	95,77
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	6.000.000	5.675.000	37,83
14	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana/Bencana Alam	750.000.000	819.650.000	804.556.000	107,27
15	Program Peningkatan Kesiagaan dan Logistik Dalam Menghadapai Bencana/Bencana Alam	500.000.000	290.500.000	209.619.500	41,92
20	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	582.349.200	706.874.450	659.981.450	113,33
21	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	72.008.000	89.053.300	84.038.300	116,71
TOTAL		5.979.228.550	6.408.665.250	5.527.509.669	92,45

S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Program yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan tahun 2014 berjumlah 41 (empat puluh satu) program dengan total target anggaran tahun 2014 sebesar Rp 65.479.681.416,- dan realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah Rp 79.374.174.217,- atau 121,22 % dari target belanja

langsung. Rincian Program berdasarkan belanja langsung tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82
Target Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Tahun 2014

NO	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD(%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.290.702.117	31.608.016.000	29.014.307.526	136,28
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	9.358.032.699	15.898.261.450	14.762.610.935	157,75
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	993.447.900	780.250.000	749.470.000	75,44
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	1.151.898.000	1.272.479.100	959.210.000	83,27
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	996.210.000	645.717.172	607.850.400	61,02
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.020.000.000	3.220.523.100	2.693.576.550	67,00
7	Program pembinaan dan fasilitasi keuangan daerah	226.600.000	197.171.900	184.817.400	81,56
8	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.492.699.500	1.523.284.900	1.311.773.300	87,88
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	102.300.000	86.560.000	81.818.800	79,98
10	Program Optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	1.485.000.000	959.197.100	606.547.400	40,84
11	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	300.000.000	393.408.000	268.941.200	89,65
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000.000	1.438.585.000	1.096.295.000	76,13
13	Penataan Daerah Otonom Baru	405.000.000	166.294.900	99.922.300	24,67
14	Program pelayanan komunikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Metro.	163.000.000	439.440.000	376.729.020	231,12
15	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.	77.000.000	-	-	0,00
16	Program kerjasama informasi dengan mass media.	84.440.000	110.000.000	100.270.000	118,75

17	Program Peningkatan Pembinaan Kehidupan Beragama, Sosial dan Kemasyarakatan	2.385.000.000	2.371.048.800	2.106.918.800	88,34
18	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyaluran Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	265.000.000	112.750.000	112.750.000	42,55
19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	150.000.000	106.060.550	0,00
20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	440.000.000	452.515.900	452.555.900	102,85
21	Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan	261.721.000	217.974.850	214.117.850	81,81
22	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	5.282.077.500	5.364.893.700	4.064.689.480	76,95
23	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	40.075.000	40.075.000	22.544.500	56,26
24	Program Kerjasama dengan Media Masa	540.525.000	582.619.000	582.533.650	107,77
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan	2.807.852.700	2.460.114.500	2.293.101.927	81,67
26	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.590.000.000	9.853.610.050	9.787.692.531	213,24
27	Program Penataan Daerah Otonom Baru	250.000.000	-	-	0,00
28	Peningkatan sistim pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	1.286.600.000	2.282.434.150	2.121.669.178	164,91
29	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan dan aparaturnya pengawasan	130.000.000	67.685.400	57.182.905	43,99
30	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan	30.000.000	22.533.000	19.851.300	66,17
31	Program Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem & Mekanisme kinerja Perangkat Daerah agar Lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel	330.000.000	268.495.000	261.095.000	79,12
32	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000.000	-	-	0,00
33	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	30.000.000	-	-	0,00
34	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan baik secara Penyuluhan, Pembinaan/Pendampingan serta Koordinasi dengan Stake	10.000.000	-	-	0,00

	holders dalam membahas permasalahan di masyarakat				
35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	40.000.000	-	-	0,00
36	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.000.000	-	-	0,00
37	Kemitraan Pemerintah & Masyarakat dalam penyelesaian Permasalahan Masyarakat	20.000.000	-	-	0,00
38	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban	10.000.000	-	-	0,00
39	Program Pembinaan Peningkatan Terhadap Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial Kemasyarakatan (Bagian Kesra)	15.000.000	-	-	0,00
40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	950.000.000	1.349.958.500	1.266.339.800	133,30
41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.159.500.000	3.484.695.300	2.990.931.015	138,50
	TOTAL	65.479.681.416	87.820.591.772	79.374.174.217	121,22

2. Capaian Kinerja Program

Dari 8 (delapan) program yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2014, capaian kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.83
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014
			REALISASI
1.	Persentase Raperda yang diajukan Terhadap total Raperda yang masuk Dalam Program Legislasi Daerah (Proledga) setiap tahun.	%	66
2.	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD	%	111,16
3.	Jumlah dan macam pajak	jenis	10
4.	Jumlah dan macam retribusi daerah	jenis	17
5.	Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali	%	0,14
6.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	14

7.	Opini BPK	Opini	WTP
8.	Rasio Tk. Pendidikan Aparatur		
	- S1	%	49,85
	- S2	%	5,40
	- S3	%	0,02

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2014 persentase Raperda yang diajukan terhadap total Raperda yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) sebesar 66% di tahun 2014. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa pencapaian PAD tahun 2014 sebesar 111,16%. Jumlah dan macam pajak tahun 2014 sebanyak 6 jenis.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Metro selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

T. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) program. Rincian program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.84
Target Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2014

NO	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	400.000.000	-	-	0,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000	-	-	0,00
	TOTAL	475.000.000	-	-	0,00

2. Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja dari urusan wajib pemberdayaan masyarakat selama tahun 2014 yaitu :

Tabel 2.85

Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2014
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klmpk	44
Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klmpk	54

U. Perpustakaan dan Arsip

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Perpustakaan dan Arsip dilaksanakan oleh Kantor Pustakardok, kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan ini selama Tahun 2014 berjumlah 10 (sepuluh) program, dengan total target anggaran tahun 2014 sebesar Rp 1.186.800.000, dengan realisasi sebesar Rp 784.141.937 atau 66,07% dari target anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.86
Target Realisasi belanja Langsung Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2014

N O	PERPUSTAKAAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIA N RKPD (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.600.000	330.011.000	253.253.887	78,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.000.000	100.770.000	92.055.000	115,07
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.000.000	-	-	0,00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	46.000.000	-	-	0,00
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	372.000.000	307.189.300	297.290.300	79,92
6	Program Pelestarian Koleksi Bahan pustaka	29.200.000	-	-	0,00
	TOTAL	862.800.000	737.970.300	642.599.187	74,48
	KEARSIPAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIA N RKPD (%)
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	25.000.000	-	-	0,00
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi / Arsip Daerah	129.000.000	96.390.000	87.789.350	68,05
3	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	135.000.000	56.840.000	53.753.400	39,82
4	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	35.000.000	-	-	0,00
	TOTAL	324.000.000	153.230.000	141.542.750	43,69

2. Capaian Kinerja Program

Dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib perpustakaan dan arsip selama tahun 2010-2014 telah berhasil mencapai kinerja program :

Tabel 2.87
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	pengunjung	55262

V. Komunikasi dan Informatika

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2014 berjumlah 7 (tujuh) Program, dengan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 3.039.360.220,- atau 101,31 % dari target anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.88
Target Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Kerjasama Dengan Media Masa	1.400.000.000	1.749.955.000	1.687.069.600	120,50
2	Program Promosi Pembangunan Daerah	400.000.000	353.000.000	327.538.370	81,88
3	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo	90.000.000	33.648.250	25.113.250	27,90
4	Program Pengkajian Penelitian Bidang Kominfo	240.000.000	200.000.000	37.220.000	15,51
5	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Kemasyarakatan	390.000.000	80.000.000	79.400.000	20,36
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika Dan Media Massa	450.000.000	923.425.000	883.019.000	196,23
7	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo	30.000.000	-	-	0,00
	TOTAL	3.000.000.000	3.340.028.250	3.039.360.220	101,31

2. Capaian Kinerja Program

Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan dalam urusan wajib Komunikasi dan Informatika tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.89

Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
1. Intensitas updating website milik Pemda	Kali/tahun	124
2. Persentase jumlah website SKPD	%	100

W. Ketahanan Pangan

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin tersedianya dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata diseluruh wilayah, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Produksi pangan nasional sebagian besar merupakan masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinan.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka memenuhi kecukupan pangan tersebut, pembangunan ketahanan pangan merupakan suatu keharusan.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan di Kota Metro dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro, tahun 2014 telah melaksanakan program yang mendukung pelaksanaan urusan ketahanan pangan berjumlah 9 (sembilan) Program, dengan total anggaran selama tahun 2014 sebesar Rp 1.850.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 883.272.214,- atau 47,72% dari target anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.90
Target Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2014

	KETAHANAN PANGAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.880.000	180.770.000	172.490.504	105,90
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana.	150.000.000	121.195.000	121.095.000	80,73
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja & keuangan.	30.000.000	18.665.000	18.665.000	62,22
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	338.000.000	605.863.250	571.021.710	168,94
5	Program Pengemb. Distribusi Pangan secara efektif & efisien.	200.000.000	-	-	0,00
6	Program Peningkatan stabilitas harga pangan.	23.000.000	-	-	0,00
7	Program Peningk.Percep.Penganekaragaman Konsumsi Pangan.	781.000.000	-	-	0,00
8	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.	90.000.000	-	-	0,00
9	Program Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan	76.000.000	-	-	0,00
	TOTAL	1.850.880.000	926.493.250	883.272.214	47,72

2. Capaian Kinerja Program

Dari program-program yang dilaksanakan dalam urusan wajib ketahanan pangan tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.91
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Persentase Ketersediaan Pangan	%	62,82

2.2.2 Urusan Pilihan

Prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan di Kota Metro selama tahun 2014 meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Pariwisata;
4. Kelautan dan Perikanan;
5. Perdagangan;
6. Industri

Untuk pencapaian dan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro selama Tahun 2014 pada masing-masing urusan pilihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pertanian

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Pilihan Pertanian di Kota Metro dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (BP4K) Kota Metro. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan program yang mendukung pelaksanaan urusan pertanian berjumlah 16 (Enam Belas) program, dengan total target anggaran tahun 2014 sebesar 9.117.723.100,- dengan realisasi sebesar Rp 13.049.655.283,- atau 143,12% dari target anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.92
Target Realisasi Anggaran Urusan Pertanian Tahun 2014

N O	PERTANIAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIA N RKPD (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.020.501.100	1.221.239.300	1.135.801.445	111,30
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	407.372.000	514.831.000	459.270.750	112,74
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	79.350.000	-	-	0,00
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.000.000	10.000.000	4.500.000	40,91
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.000.000	71.169.700	67.849.200	133,04
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	872.500.000	1.036.553.620	978.677.823	112,17
7	Program Peningkatan Ketahanan pangan	290.000.000	224.815.800	199.215.800	68,70
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	277.000.000	216.986.000	157.757.000	56,95
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	161.500.000	348.935.000	341.933.070	211,72
10	Program Peningkatan produksi pertanian	1.045.000.000	7.464.119.300	7.425.314.364	710,56
11	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	407.500.000	382.883.700	374.676.412	91,95
12	Program Peningkatan Kompetensi dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	75.000.000	-	-	0,00
13	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Ternak	360.000.000	255.030.000	248.880.000	69,13
14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	220.000.000	462.697.300	409.840.033	186,29
15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	2.700.000.000	45.800.000	38.615.000	1,43
16	Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan	1.140.000.000	1.224.162.400	1.207.324.386	105,91
	TOTAL	9.117.723.100	13.479.223.120	13.049.655.283	143,12

2. Capaian Kinerja Program

Dari seluruh program yang dilaksanakan dalam urusan pilihan pertanian tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.93
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Produksi Padi	Ton	19.155,24
Produksi Jagung	Ton	3.510
Produksi Ubi Kayu	Ton	8.161,85
Populasi Ternak Sapi Potong	Ekor	5.949
Populasi Ternak Kambing	Ekor	9.972
Populasi Ayam (Kampung,Petelur,Pedaging)	Ekor	1.276.243

B. Kehutanan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Untuk program pada urusan pilihan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Metro Tahun 2014 terdapat 5 (lima) Program, dengan total target Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 1.852.500.000,- dengan Realisasi Tahun 2014 sebesar Rp 16.543.057,- atau 0,89% dari target Anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.94
Target Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan Tahun 2014

NO	KEHUTANAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	300.000.000	0	0	0,00
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	65.000.000	0	0	0,00
3	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.397.500.000	19.160.000	16.543.057	1,18
4	Program perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan	30.000.000	0	-	0,00
5	Program pembinaan dan penerbitan Industri Hasil Hutan	60.000.000	0	0	0,00
	TOTAL	1.852.500.000	19.160.000	16.543.057	0,89

C. Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Metro menjadi tanggungjawab Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, dengan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.95
Target Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Tahun 2014

	ENERGI	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pembinaan & Pengawasan Bidang Air Tanah	190.000.000	-	0	0,00
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0	109.560.000	96.280.000	0,00
	TOTAL	190.000.000	109.560.000	96.280.000	50,67

D. Pariwisata

1. Program yang Telah Dilaksanakan

Program Pengembangan Pariwisata Kota Metro menjadi tanggungjawab Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.96
Target Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata Tahun 2014

	PARIWISATA	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	456.734.000	440.339.000	399.474.000	87,46
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	328.128.200	150.740.000	140.990.000	42,97
3	Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000	70.000.000	61.363.000	61,36
	TOTAL	884.862.200	661.079.000	601.827.000	68,01

2. Capaian Kinerja Program

Tabel 2.97

Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

Indikator Kinerja	2014
Jumlah Event Kesenian/ kebudayaan	5

E. Kelautan dan Perikanan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Untuk program pada urusan pilihan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Metro Tahun 2014 telah dilaksanakan sejumlah 3 (tiga) Program, dengan total target Anggaran selama Tahun 2014 sebesar Rp 1.830.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 25.938.000,- atau 1,42% dari target Anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.98

Target Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

	KELAUTAN DAN PERIKANAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.655.000.000	1.188.000	1.188.000	0,07
2	Program Optimalisasi Pengolahan & Pemasaran Produksi Perikanan	175.000.000	0	-	0,00
3	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	0	25.000.000	24.750.000	0,00
	TOTAL	1.830.000.000	26.188.000	25.938.000	1,42

2. Capaian Kinerja Program

Dari seluruh program yang dilaksanakan dalam urusan pilihan kelautan dan perikanan tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.99
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
Produksi Ikan (Kolam)	ton	1.673,70

F. Perdagangan

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan pilihan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar dengan jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 9 (sembilan) program, yaitu:

Tabel 2.100
Target Realisasi Anggaran Urusan perdagangan Tahun 2014

	PERDAGANGAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	553.000.000	809.201.530	713.750.211	129,07
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	274.000.000	282.047.700	280.177.416	102,25
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.000.000	53.159.000	52.800.000	120,00
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	3.500.000	2.600.000	0,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	34.000.000	-	-	0,00
6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.310.000.000	-	-	0,00
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	327.000.000	189.060.300	188541300	57,66
8	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	388.000.000	251.199.000	181034320	46,66
9	Program Pembangunan Infrastruktur Pasar Pedesaan	1.134.000.000	3.165.018.840	3154011433	278,13
	TOTAL	4.064.000.000	4.753.186.370	4.572.914.680	112,52

2. Capaian Kinerja Program

Dari 9 (sembilan) program yang dilaksanakan dalam urusan pilihan perdagangan tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.101
Realisasi Capaian Kinerja Program Urusan Pilihan Perdagangan
Tahun 2014

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014
Persentase Jumlah Pelanggaran yang Berkaitan Dengan Perdagangan	%	100

Menurut tabel dapat dilihat bahwa Dinas Perdagangan dan Pasar dapat melaksanakan kinerja dengan baik. Ditunjukkan dari persentase jumlah pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan dapat diselesaikan semua. Hal yang berkaitan dengan perselisihan perdagangan dan perlindungan konsumen adalah hal yang penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pedagang dan konsumen dalam membeli produk di Kota Metro.

G. Industri

1. Program Yang Telah Dilaksanakan

Urusan Wajib Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, dengan jumlah program yang mendukung pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM ini Tahun 2014 berjumlah 4 (empat) Program, dengan total target Anggaran tahun 2014 sebesar Rp 460.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp 505.596.700,00 atau 109,91% dari target Anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.102
Target Realisasi Anggaran Urusan Industri Tahun 2014

	PERINDUSTRIAN	RKPD	APBD	REALISASI	CAPAIAN RKPD (%)
1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	55.000.000	138.695.000	135.249.000	245,91
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	370.000.000	195.587.700	187.447.700	50,66
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	159.400.000	159.400.000	0,00
4	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	35.000.000	23.500.000	23.500.000	67,14
	TOTAL	460.000.000	517.182.700	505.596.700	109,91

2. Capaian Kinerja Program

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan dalam urusan pilihan Industri tahun 2014 telah berhasil mencapai kinerja program antara lain :

Tabel 2.103
Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
a. Rata-rata Omset Industri Kreatif	Rp	9.214.000.000
b. Jumlah Industri Kreatif	Unit	668

2.3 Capaian MDGs Kota Metro Tahun 2014

Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia. Konsisten dengan itu, Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen penganggarannya. Berdasarkan strategi *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan produktif dengan masyarakat madani dan sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs, Presiden telah menetapkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Salah satu amanat yang tercantum dalam Inpres tersebut adalah agar para Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunanberkeadilan, antara lain meliputi program pencapaian tujuan pembangunan millennium (*millennium development goals/MDGs*).

Pemerintah Kota Metro melalui beberapa SKPD terkait telah melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran MDGs dan beberapa indikator menunjukkan hasil yang positif sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Capaian Target MDGs Kota Metro Tahun 2015

Indikator		Acuan Dasar	2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
1		2	5	6	7	8
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) perhari dalam kurun waktu 1990 - 2015						
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Telah tercapai				
1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	21.42 % (2005)	11,08% (2013)	8-10 %	▼	BPS
1.3	Indeks kedalaman kemiskinan	3.94 % (2009)	1,53 (2013)	Berkurang	►	BPS
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	6.23 % (2006)	N/A	Meningkat		BPS
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	62.79 % (2005)	57.77%	Meningkat	●	BPS
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	66.40 % (2004)	36.08%	40%	►	BPS
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 - 2015						
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi		<15,50% 45 kasus	<15,50%	●	Riskesdas 2013
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	12.2 % (2005)	< 15,50% 4 kasus	<15,50 %	●	Riskesdas 2013
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	0.57 % (1999)	N/A			Riskesdas 2013
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:	20 % (2007)				
	< 1.400 Kkal/kapita/hari		23.66%	9.44%	●	BPS
	< 2.000 Kkal/kapita/hari		72.46%	35.32%	●	BPS
Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua						
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar						

2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94.05 % (2001)	97.38%	98.35%	●	BPS
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI		100%	100%	●	
2.3	Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	P: 91.27 % L: 96.07 % (2005)	100%	100%	●	BPS
	Laki-laki		100%	100%	●	BPS
	Perempuan		100%	100%	●	BPS

Tujuan 3. Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi					
	Rasio APM Perempuan/laki-laki di SD/MI	98.45 % (2009)	99.79%	100%	●	BPS
	Rasio APM Perempuan/laki-laki di SMP/MTs	96.82 % (2002)	106.32%	100%	●	BPS
	Rasio APM Perempuan/laki-laki di SMA/MA	94.49 % (2002)	96.62%	100%	▶	BPS
	Rasio APM Perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	102.8	-	100%		BPS
3.2	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		100%	100%	●	BPS
3.3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	27.20 % (2007)	-	Meningkat		BPS
3.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	12.03 % (2004)	24% (6/25)	Meningkat	●	BPS

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4A: Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990-2015

4.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	49 (2000)	0,9 (3 kasus per 3.427 kelahiran)	23 per 1000 kelahiran hidup	●	SDKI
4.2	Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup	86 (1990)	1,2 (4 kasus per 3.427 kelahiran)	32 per 1000 kelahiran hidup	●	

4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86.3 % (2008)	98.60%	100%	●	Laporan Rutin Dinkes
Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu						
Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu hingga 3/4 dalam kurun waktu 1990-2015						
5.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	373 (1997)	2 kasus per 3.427 kelahiran	102 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2077)	●	SDKI
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	79 % (2004)	98.82%	91%	●	Laporan Rutin Dinkes
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun	70.79 % (2003)	70%	82%	▶	BPS
5.4	Tingkat kelahiran pada remaja per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		N/A	32.6		BPS/BKKBN
5.5a	Cakupan pelayanan antenatal (K1)		98.40%	99%	●	Laporan Rutin Dinkes
5.5b	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	79.14 % (2003)	96.67%	96%	●	Laporan Rutin Dinkes
5.6	Unmet Need KB (Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi)		N/A	4.8		BPS/BKKBN
Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya						
Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015						
6.1	Prevalensi HIV/AIDS	0.16 % (1990)	<0,5% 2 kasus	< 0,5%	●	Laporan Rutin Dinkes
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi	12.8 % (2002/2003)	N/A	65%		tidak ada survey tahun 2014
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		N/A	95%		survey hanya satu kali
Target 6 B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015						
6.4	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	100%	100%	100%	●	Laporan Rutin Dinkes
Target 6 C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit menular lainnya (tuberkulosis) hingga tahun 2015						
6.5	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun	343 (1990)	74 kasus	163	●	Laporan Rutin Dinkes
6.6	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	443 (1990)	48.54	180 per 100.000	●	Laporan Rutin Dinkes

				penduduk		
6.7	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	92 (1990)	N/A	27		Laporan Rutin Dinkes
6.8	Proporsi kasus TB yang ditemukan DOTS	28 (2004)	48.54%	80	●	Laporan Rutin Dinkes
6.9	Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate)	94 (2004)	81.00%	94	▶	Laporan Rutin Dinkes
6.10a	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk	14.82 (2000)	<1 per 1000 penduduk	<1 per 1000 penduduk	●	Laporan Rutin Dinkes
6.10b	Tingkat kematian karena malaria per 1.000 penduduk		< 2	< 2	●	Laporan Rutin Dinkes
6.11a	Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk)	10.54 % (2005)	142 kasus*	55 per 100.000 penduduk	▼	Laporan Rutin Dinkes
6.11b	Angka kematian karena DBD	1.63 (2005)	2.10%	1%	▼	Laporan Rutin Dinkes

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan			52%		
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida		-	Berkurang 26% pada 2020		
				Berkurang 2% pada tahun 2029		
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)		-	0 CFCs dengan mengurangi HFCFCs		
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		-	Tidak melebihi batas		
				100% (tidak melebihi batas)		

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang

signifikan pada tahun 2010						
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan			77.60%		
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial			Tetap		
			-	Meningkat		
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015						
7.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan			70.55%		Laporan Rutin Dinkes
						BPS
				70.00%		Dinas Pengairan dan Permukiman
7,7a	Perkotaan		69.91%	75.29%		BPS
						Dinas Pengairan dan Permukiman
7,7b	Perdesaan			65.81%		BPS
						Dinas Pengairan dan Permukiman
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan			61.10%		Laporan Rutin Dinkes
						BPS
				51.66%		Dinas Pengairan dan Permukiman
7.8a	Perkotaan			75.73%		BPS
				51.66%		Dinas Pengairan dan Permukiman
7.8b	Perdesaan			52.15%		BPS
				51.66%		Dinas Pengairan dan Permukiman
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020						
7.9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan			0%		BPS
				12%		Dinas Pengairan dan Permukiman

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2016 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pendidikan adalah (1) belum tercapainya SPM Bidang Pendidikan di sekolah-sekolah di Kota Metro; (2) masih lemahnya peraturan dan kebijakan yang mendukung diprioritaskannya siswa yang berasal dari Kota Metro untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah favorit di Kota Metro; (3) bagaimana menciptakan Kota Metro sebagai kota pendidikan yang agamis; (4) kurangnya SDM tenaga kependidikan;

2. Kesehatan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Kesehatan adalah (1) bagaimana meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; (2) belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; (3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku dan budaya hidup sehat; (4) masih kurangnya tenaga ahli medis/dokter spesialis; (5) belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan yang mendukung manajemen kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dijumpai pada aspek kebinamargaan adalah (1) masih kurang optimalnya kegiatan pemeliharaan jalan; (2) perlunya pembangunan median jalan untuk ruas jalan kota tertentu seperti Jl. Pattimura, Jl. Alamsyah RPN, Jl. Budi Utomo dan Jl. Sukarno Hatta; (3) perlunya antisipasi terhadap rencana pembangunan ruas jalan lingkaran utara Kota Metro; (4) perlunya pengangkatan sedimen pada drainase jalan

untuk menghindari genangan seperti pada ruas Jl. Diponegoro, Jl. Imam Bonjol, dan Jl. Yos Sudarso;

Permasalahan yang dijumpai pada aspek keciptakarya adalah (1) masih rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum perpipaan skala perkotaan; (2) kurang optimalnya kelembagaan air minum setingkat UPT; (3) perlunya pengangkatan sedimen yang berada pada saluran drainase jalan lingkungan untuk menghindari genangan; (4) perlunya peningkatan sarana prasarana kebersihan dan persampahan; (5) kurang optimalnya kampanye pemilahan sampah dan praktek 3R di masyarakat; (6) perlunya pengembangan bank sampah pada tiap kelurahan; (7) perlunya peningkatan kualitas pembangunan drainase;

Permasalahan yang dijumpai pada aspek sumberdaya air dan irigasi adalah (1) masih dijumpainya warga yang melakukan praktek buang sampah sembarangan ke saluran irigasi; (2) kurang optimalnya pemanfaatan Dam Raman sebagai objek pariwisata; (3) rendahnya perhatian terhadap pemeliharaan saluran irigasi teknis;

Permasalahan yang dijumpai pada aspek penataan ruang adalah (1) belum optimalnya pemanfaatan taman kota sebagai RTH perkotaan; (2) kurangnya penyediaan akses bagi para penyandang cacat pada ruang publik; (3) optimalisasi penghijauan pada daerah aliran sungai/irigasi; (4) perlunya peningkatan sosialisasi terhadap ketentuan GSB dan IMB; (5) perlunya peninjauan kembali/review terhadap regulasi di bidang perijinan; (6) perlunya digalakkan kampanye untuk perubahan perilaku masyarakat terhadap kota hijau dan berkelanjutan; (7) pengendalian dan peningkatan fungsi trotoar sebagai prasarana pejalan kaki;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah (1) masih rendahnya kualitas hunian untuk MBR di Kota Metro; (2) optimalisasi terhadap rumah susun sederhana sewa yang telah dibangun; (3) masih didapatinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah di Kota Metro;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah (1) pendidikan politik masyarakat masih rendah; (2) krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum; (3) peningkatan kesadaran warga terhadap keamanan di lingkungan tempat tinggalnya;

6. Sosial

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Sosial adalah (1) adanya kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial (PMKS); (2) belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Tenaga Kerja adalah (1) masih tingginya tingkat pengangguran; (2) kurangnya jiwa kewirausahaan; (3) masih terjadinya mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja;

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah (1) kesetaraan gender; (2) masih rentannya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

9. Pangan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pangan adalah (1) masih kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung dan kemandirian pangan pada berbagai sektor; (2) belum tercapainya pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

10. Pertanahan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pertanahan adalah (1) banyaknya tanah yang belum bersertifikat di Kota Metro;

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Lingkungan Hidup adalah (1) perlunya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; (2) perlunya sosialisasi tentang

dokumen-dokumen lingkungan hidup dan regulasi tentang LH; (3) optimalisasi penanganan sampah mulai dari rumah tangga sampai dengan TPA; (3) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori; (4) pengembangan IPAL komunal dan tanki septik komunal;

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah (1) masih rendahnya sinkronisasi data kependudukan antara BPS dan SKPD penanggung jawab administrasi kependudukan; (2) masih lemahnya penataan administrasi kependudukan baik kelahiran maupun kematian;

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah (1) minimnya sarana dan prasarana pada tingkat kelurahan; (2) belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur kelurahan; (3) rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses kesempatan berusaha; (4) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi wilayahnya;

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah (1) belum optimalnya pengendalian penduduk; (2) masih rendahnya sarana prasarana dalam penyuluhan KB; (3) masih rentannya tindak kekerasan dalam keluarga terhadap perempuan;

15. Perhubungan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Perhubungan adalah (1) optimalisasi manajemen lalu lintas pada kawasan CBD Kota Metro; (2) peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (3) perlunya kampanye atau penyuluhan keselamatan berlalu lintas bagi pelajar, masyarakat umum dan pengemudi angkutan umum; (4) optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan terminal penumpang dan barang; (5) pengembangan jalur sepeda ke lokasi sekolah-sekolah di Kota Metro;

16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah (1) belum optimalnya pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah; (3) perlunya pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan telepon selular;

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah (1) peningkatan mutu SDM yang lebih kreatif dan mampu bersaing dalam dunia usaha; (2) penciptaan iklim usaha yang kreatif; (3) pengembangan komoditi lokal sebagai potensi ekonomi kreatif; (4) pengembangan sentra-sentra komoditi kreatif; (5) perlunya kerjasama antar wilayah untuk mendukung pariwisata;

18. Penanaman Modal

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Penanaman Modal adalah (1) peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang akuntabel dan transparan; (2) penyediaan informasi kepada pengusaha/investor; (3) adanya kepastian dan kejelasan kebijakan; (4) mendorong pengembangan sektor jasa dan perdagangan; (5) meningkatkan daya saing pengusaha lokal/daerah; (6) membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi;

19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah (1) terbatasnya ketersediaan sarana olahraga; (2) terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; (3) rendahnya mental juara; (4) terbatasnya perhatian pemda terhadap kegiatan kepemudaan dan event-event olahraga;

20. Statistik

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Statistik adalah (1) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik; (2) referensi data pembangunan yang beragam;

21. Kebudayaan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Kebudayaan adalah (1) kurangnya kreativitas dan pelestarian budaya lokal; (2) minimnya sumberdaya dan pengembangan budaya lokal; (3) kurangnya sarana prasarana pendukung kesenian dan kebudayaan;

22. Perpustakaan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Perpustakaan adalah (1) kurangnya SDM yang mengelola perpustakaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas; (2) kurang beragamnya buku-buku koleksi perpustakaan; (3) kurang memadainya fasilitas pendukung perpustakaan; (4) masih rendahnya budaya baca masyarakat;

23. Kearsipan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Kearsipan adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan; (2) rendahnya kesadaran tentang arti penting arsip dalam pemerintahan;

24. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah (1) peningkatan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; (2) pengelolaan pembudidayaan ikan;

25. Pariwisata

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pariwisata adalah (1) Kota Metro belum memiliki ikon wisata dan paket wisata yang komprehensi dan berdaya saing; (2) belum memadainya fasilitas pendukung pariwisata;

26. Pertanian

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Pertanian adalah (1) meningkatnya alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis menjadi lahan perumahan/kawasan komersial; (2) pemanfaatan teknologi terapan untuk pertanian dan peternakan; (3) peningkatan produksi peternakan; (4) perbaikan sarana dan prasarana pertanian; (5) peningkatan mutu SDM bidang pertanian dan perikanan; (6) penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida pertanian;

27. Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah tangga.

28. Perdagangan

Permasalahan yang dijumpai pada Urusan Perdagangan adalah (1) pemerataan penyebaran pasar tradisional untuk melayani masyarakat; (2) penataan kualitas layanan dan distribusi komoditi pasar tradisional; (3) pengawasan harga komoditi pasar; (4) kemudahan akses masyarakat terhadap pasar tradisional;

2.4.2 Isu Strategis Kota Metro

Beranjak dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah diinventarisir dan selanjutnya menjadi salah satu penentuan prioritas pembangunan Kota Metro Tahun 2016, maka dirumuskanlah beberapa isu strategis Kota Metro Tahun 2016, yang juga menjadi dasar penetapan tema dan prioritas pembangunan dan telah disepakati dalam Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

1. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perkotaan
- b. Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
- c. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
- d. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- e. Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum di Bidang LH dan SDA
- f. Optimalisasi Promosi Potensi Pariwisata melalui Event dan Media Sosial, serta Pengembangan Destinasi Pariwisata
- g. Pengembangan Sumber Energi Alternatif

2. Ekonomi

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
- c. Antisipasi Krisis Pangan
- d. Pengendalian Alih Fungsi Lahan
- e. Intensifikasi Teknologi Pertanian
- f. Peningkatan Keamanan Pangan

3. Sosial Budaya

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- b. Peningkatan Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan
- c. Peningkatan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
- d. Penggalan dan Pengembangan Budaya Lokal Berkarakter
- e. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan SDM Aparatur.